

UPAYA SADDAM HUSSEIN MENGHADAPI SANKSI PBB PASCA PERANG TELUK II

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Judul Pembelian Tanggal 11.03 FEB 2004 No. Induk	Kelas 320.9567 MAR U e
---	---------------------------------

Oleh **Ana Mariyati** *IRAK - POLITIK DAN DEMOKRATISASI*
980910101246

Pembimbing
Drs. SJOEKRON SJAH, SU
NIP. 130 325 930

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2003

LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 14 Agustus 2003
Waktu : Pkl. 09.00 WIB

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris


Drs. Asrial Azis
NIP. 130 355 413


Drs. Sjoekron Sjah, SU
NIP. 130 325 930


Susunan Panitia Penguji:

1. Drs. Asrial Azis (Ketua)
NIP. 130 355 413
2. Drs. Sjoekron Sjah, SU (Sekretaris)
NIP. 130 325 930
3. Drs. A. Habibullah, MS.i (Anggota)
NIP. 131 952 242
4. Dra. Sri Yuniati, MS.i (Anggota)
NIP. 131 355 413

Mengetahui:

Dekan FISIP UNEJ,




Drs. H. Moch Toerki
NIP. 130 524 832

LEMBAR PERNYATAAN

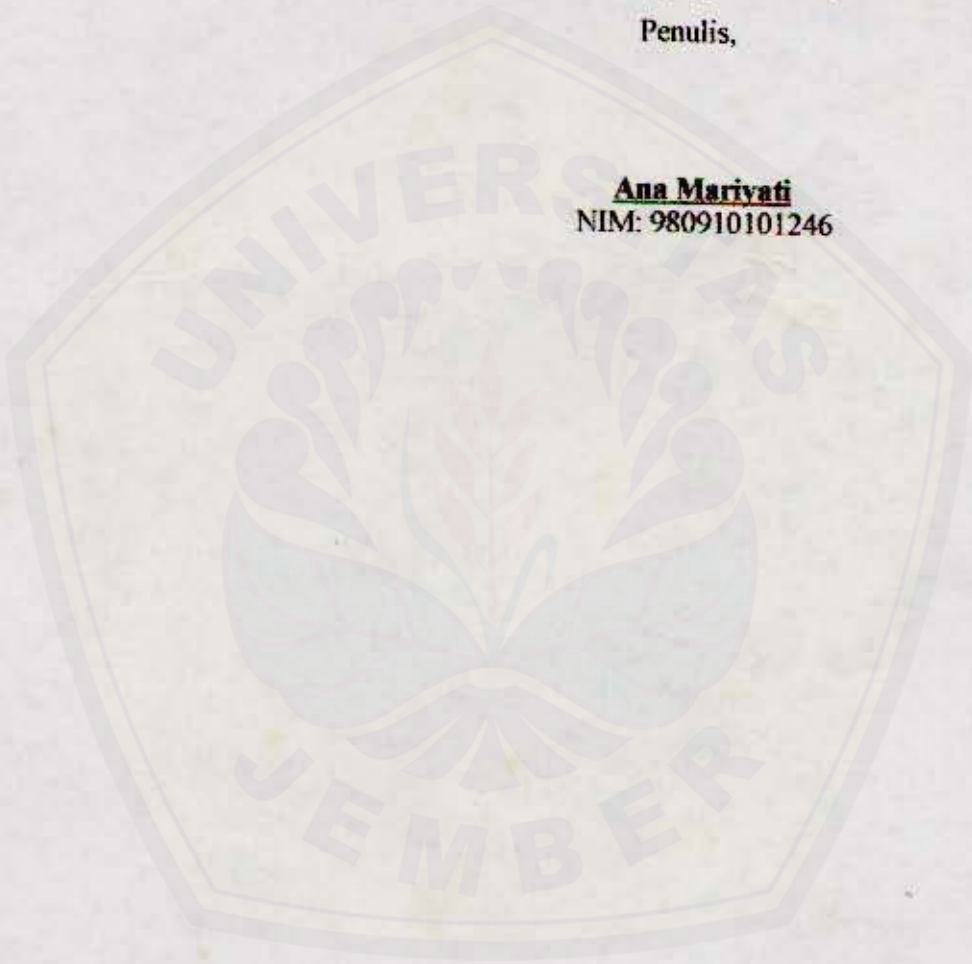
Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui.

Jember, Agustus 2003

Penulis,

Ana Mariyati

NIM: 980910101246



Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda Marjono dan Ibunda Kartiyah

*Beserta Bapak dan Ibu Mertua H. Sufyan dan Hj. Umi Kulsum
Doa, kasih sayang, perhatian, dan kesabaran yang engkau curahkan*

*Membuatku terus merasakan kebahagiaan dan
kedamaian yang tiada bandingnya*

Suamiku tercinta Mas Imam Gozali, S.P.

*Berjuta perhatian dan kesabaran serta ketulusan hati
yang selalu mas berikan*

*Membimbingku untuk terus selalu berbuat yang terbaik
Engkaulah masa depanku*

Adikku tersayang, Linto dan Novi

*yang selalu memberi dorongan, semangat, dan keceriaan
Mbak bangga menjadi bagian dari kalian*

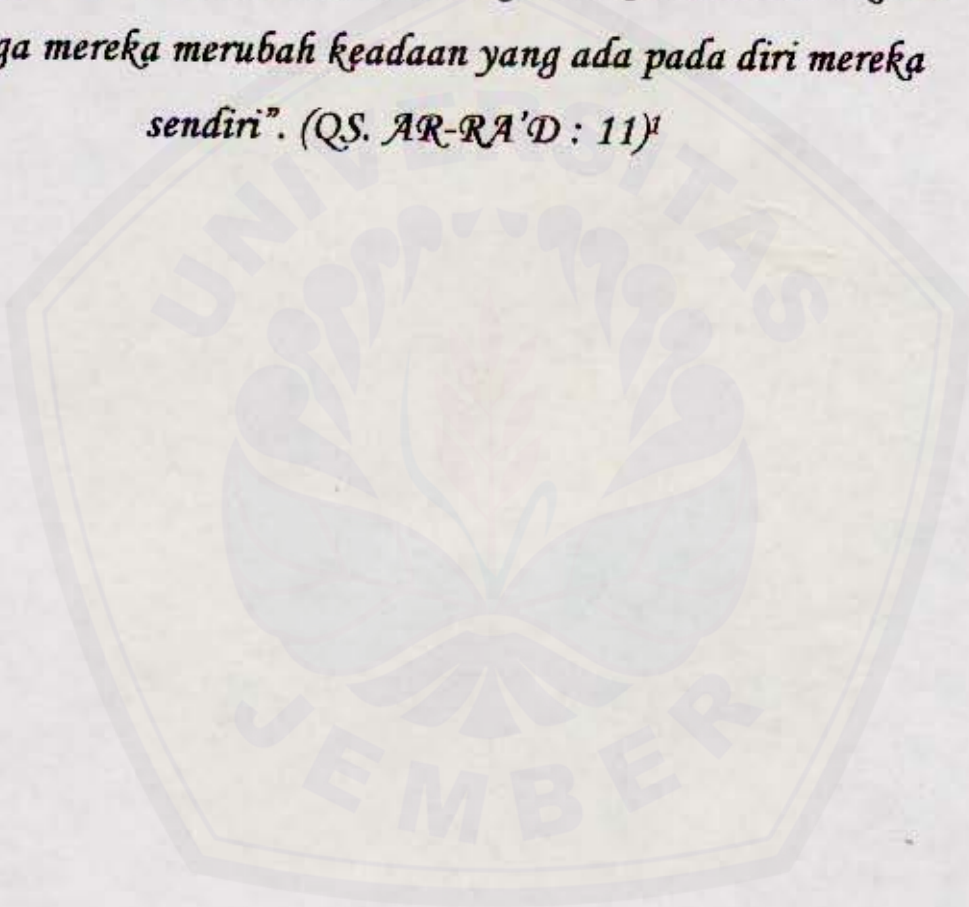
Pangeran kecilku "Olga Qurumulbahri Daniswara"

*Tawa dan tangismu selalu memberi keceriaan
Engkaulah anugerah terindah dalam hidupku*

Bangsa dan negaraku Indonesia

Motto

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. AR-RA’D : 11)¹



Dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Mahkota Surabaya, 1996

Hamdan wa Syukron penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Saddam Hussein Dalam Memimpin Irak Menghadapi Sanksi PBB Pasca Perang Teluk II** ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas motivasi, saran, bimbingan, petunjuk, fasilitas, dan lain-lain kepada:

1. Drs. Sjoekron Sjah, S.U., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang berarti bagi penulis.
2. Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember.
3. Drs. Sunardi Purwoatmoko, selaku Dosen Wali.
4. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi serta segenap Civitas Akademika FISIP Universitas Jember.
6. Mbak Erna serta keluarga yang telah membimbing dan membantu terselesaikannya skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat yang selalu ada di saat aku membutuhkan pertolongan.
8. Teman-teman HI'98 serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis perlukan. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi yang membacanya, serta mampu memberikan sedikit tambahan ilmu yang berguna.

Jember, Agustus 2003

Penulis

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	3
1.2.1 Pembatasan Materi.....	4
1.2.2 Pembatasan Waktu.....	4
1.3 Permasalahan.....	5
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	7
1.5 Hipotesis.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.6.2 Metode Analisa Data.....	16
1.7 Pendekatan.....	17
BAB II KONFLIK IRAK DAN KUWAIT SEBAGAI PENYEBAB PERANG TELUK II.....	19
2.1 Latar Belakang Terjadinya Konflik.....	19
2.1.1 Segi Sejarah Geografis.....	21
2.1.2 Kepentingan Ekonomi Irak.....	22
2.1.3 Ambisi Saddam Hussein Menjadi Pemimpin Dunia Arab.....	24.

2.2 Meletusnya Perang Teluk II.....	27
2.3 Implikasi Perang Teluk II Terhadap negara-negara Sekitar.....	32
BAB III SANKSI PBB DAN IMPLIKASINYA BAGI IRAK.....	34
3.1 Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB.....	37
3.2 Implikasi Sanksi PBB Bagi Irak.....	44
3.2.1 Krisis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Kemerosotan Bidang Sosial Kemasyarakatan Dalam Negeri Irak.....	45
3.2.2 Krisis Kehidupan Politik Pemerintahan Irak.....	48
BABI IV KEBIJAKAN DALAM NEGERI SADDAM HUSSEIN.....	50
4.1 Kebijakan Di Bidang Ekonomi.....	51
4.1.1 Eksport Minyak Secara Illegal.....	51
4.1.2 Pembangunan Bidang Pertanian.....	53
4.2 Kebijakan Di Bidang Sosial Budaya.....	55
4.3 Kebijakan Di Bidang Politik Pemerintahan.....	58
BAB V KESIMPULAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Peta Irak

Lampiran 2: Perbandingan Kekuatan Irak VS Multinasional

Lampiran 3: Resolusi-resolusi DK – PBB Tentang Konflik Teluk



PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Saddam Hussein selaku Presiden Irak menerapkan beberapa kebijakan untuk menghadapi sanksi PBB setelah Perang Teluk II (1990 – 1991). Kebijakan tersebut meliputi bidang ekonomi, politik pemerintahan serta penguatan legitimasinya sebagai pemimpin Irak. Saddam mengambil kebijakan bidang ekonomi karena Irak menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Sanksi ekonomi yang diterapkan di Irak telah membawa Irak menghadapi perang yang lain, yaitu perang melawan kurangnya air, makanan, obat-obatan dan berjangkitnya kolera serta disentri. Korban utamanya adalah anak-anak, karena sekitar 170.000 balita Irak menderita kelaparan dan kurang gizi. Menurut Palang Merah Irak, sejak berakhirnya Perang Teluk II, 80 % dari seluruh kematian di Irak adalah anak-anak.¹ Irak juga mengalami krisis keuangan yang sangat hebat. Tingkat inflasi sangat tinggi, sehingga menyebabkan melambungnya harga barang kebutuhan sehari-hari. Intinya, sanksi ekonomi yang diterapkan di Irak telah membawa Irak pada kondisi yang serba kekurangan, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Kebijakan Saddam di bidang ekonomi telah berhasil membawa rakyat Irak keluar dari kemelut ekonomi, buktinya meskipun diembargo selama 10 tahun, yang terjadi di Irak bukannya kehidupan yang melarat tetapi bertambah makmur.²

Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan hukuman bagi Irak melalui resolusi-resolusinya yang kesemuanya berjumlah 12 buah. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB itu antara lain menerapkan sanksi ekonomi di Irak dengan memberlakukan embargo ekonomi (perdagangan), militer, serta pembekuan aset Irak di luar negeri.³ Bidang politik pemerintahan terdapat kelompok maupun elit

¹ *Tempo*, 22 Juni 1991

² Tabrani Syabirin, *Irak Setelah di Embargo 10 Tahun*, (online), (<http://www.hidayatullah.com/2000/02/perjalan.htm>), diakses 4 April 2002

³ Riza Sihbudi, *Dari Konflik Irak – Kuwait ke Konflik Irak – AS dalam Global Jurnal Politik Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 33

politik yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Seperti adanya pembelotan Hussein Kamel dan Saddam Hassan yang merupakan menantu Saddam Hussein ke Yordania untuk menggulingkan kekuasaannya dengan mencari dukungan dari luar negeri.⁴ Pembelotan kedua menantu Saddam ini merupakan bukti tidak stabilnya kehidupan politik pemerintahan di Irak akibat adanya sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB. Tetapi semua bentuk upaya untuk menggulingkan kekuasaannya dapat digagalkan. Saddam sangat berkuasa atas militer dan media massa yang makin menguatkan kekuasaannya. Karena dengan penguasaan penuh atas militer dan media massa ia dapat mempengaruhi rakyat untuk bersimpati terhadap tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Terbentuknya opini publik sangat tergantung pada informasi-informasi dan tekanan yang ada. Sehingga tidak mengherankan bila dalam referendum yang diadakan pada Oktober 1995 Saddam mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Irak dengan total suara hampir 100 %.⁵ Saddam nampaknya bisa membawa rakyat Irak agar tetap bertahan menghadapi sanksi-sanksi PBB. Ia berhasil membawa Irak menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keberhasilan yang dicapai Irak di bawah kepemimpinannya. Sampai sekarang pun Saddam Hussein tetap bisa mempertahankan kekuasaannya di Irak, meskipun selalu mendapatkan tekanan-tekanan baik dari dalam maupun luar negeri.

Konflik Irak-Kuwait pada awalnya merupakan konflik bilateral antara kedua belah pihak. Konflik ini kemudian meluas menjadi konflik multilateral. Hal ini disebabkan karena banyak negara yang mempunyai kepentingan di kawasan Timur Tengah, terutama masalah ekonomi yang berdampak pada sektor-sektor lain. Timur Tengah merupakan sumber pemasok minyak terbesar bagi negara-negara di dunia, karena 65 % cadangan minyak dunia terdapat di Timur Tengah, yaitu Irak mampu memproduksi 2 juta barel perhari, Kuwait 1,7 juta barel perhari, dan Saudi Arabia 7,05 juta barel perhari.⁶ Serangan Irak ke Kuwait ini mendorong negara-negara lain untuk terlibat di dalamnya dan pecahlah konflik antara Irak –

⁴ *Jawa Pos*, 28 Februari 1996

⁵ *Ibid*.

⁶ *Suara Merdeka*, 10 April 2002

Amerika Serikat dan sekutunya yang berada di pihak Kuwait, serta terlibatnya PBB sebagai organisasi internasional untuk menangani konflik yang terjadi.

Saddam Hussein sebagai seorang pemimpin di negara yang menghadapi tekanan internasional mempunyai posisi dan arti tersendiri bagi rakyat Irak dan musuhnya. Musuh Saddam yang sebagian besar negara barat dengan AS sebagai pemimpinnya, menganggap Saddam sebagai "manusia paling berbahaya di dunia" atau "Hitler jaman ini". Mereka menilai Saddam akan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan cita-citanya, meskipun harus dibayar dengan nyawa rakyat Irak. Tetapi di lain pihak warga Irak menganggap Saddam sebagai sosok pemimpin yang berani membela kepentingan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan rakyat Irak pada Saddam, meskipun mereka dalam kemiskinan di bawah kepemimpinannya. Penderitaan yang mereka alami belum mampu memicu sikap anti Saddam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, rakyat Irak tetap berjuang di belakang Saddam untuk membela kewibawaan pemimpin mereka. Sikap dan semangat rakyat Irak ini seperti di kemukakan oleh seorang diplomat di Irak, bahwa semakin keras pukulan pihak lawan terhadap Saddam justru semakin memperkuat posisinya dalam kekuasaan.⁷

Dalam menyikapi fenomena yang demikian menarik ini penulis akhirnya merasa terdorong untuk lebih jauh menganalisa secara mendalam tentang segala sesuatu yang berada di balik keberhasilan Saddam Hussein dalam memimpin Irak menghadapi sanksi-sanksi PBB yang diterapkan di negaranya. Dalam mengamati fenomena tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh masalah ini dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul :

"UPAYA SADDAM HUSSEIN MENGHADAPI SANKSI PBB PASCA PERANG TELUK II"

1.2 Ruang lingkup Pembahasan

Memberikan batasan terhadap pembahasan mempunyai arti penting dan esensial. Hal ini untuk mencegah pembahasan yang bertele-tele terhadap data-data yang kurang relevan dengan fokus kajian yang telah ditetapkan. Selain itu

⁷ *Pikiran Rakyat*, 14 September 1995

membatasi pembahasan merupakan langkah menuju pokok permasalahan, sehingga dapat berjalan runtut menuju ke satu titik tujuan dan dapat memudahkan dalam mengatasi kendala-kendala dalam mencari dan mengumpulkan data.

Sutrisno Hadi menyatakan bahwa:

“Sekali suatu pokok persoalan telah ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyelidik sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada siapa laporan research itu hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya kerician pengertian pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya.”⁸

Setiap penulisan ilmiah harus ada lingkup dan arah pembahasan, sehingga tidak mengalami pelebaran dan kedangkalan terhadap pokok permasalahan. Selain itu lingkup pembahasan dapat menjadi tata tertib bagi proses penelitian yang dilakukannya. Oleh karena itu, penulisan ini di batasi oleh dua aspek yaitu: batasan materi dan waktu.

1.2.1 Pembatasan Materi

Pada pembatasan materi ini penulis lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan dinamika atas langkah-langkah kebijaksanaan dalam negeri yang diambil oleh Saddam Hussein dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mengatasi krisis dalam negeri Irak yang semakin berkembang dan meluas setelah berakhirnya Perang Teluk II, baik yang berkenaan dengan implikasi pemberlakuan sanksi ekonomi PBB maupun konflik-konflik intern Irak lainnya.

1.2.2 Pembatasan Waktu

Ditentukan waktu antara tahun ditetapkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.661 tanggal 6 Agustus 1990 mengenai embargo terhadap Irak sebagai sanksi atas serangan Irak ke Kuwait sampai pada Desember 1999. Pertimbangannya adalah bahwa sejak berlakunya resolusi inilah rakyat Irak sangat

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Field Study Thesis and Disertasi*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hal. 8

menderita karena dengan sendirinya mereka terkucil dari kehidupan dengan negara lain dan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Saddam Hussein sebagai seorang pemimpin negara. Pembatasan sampai dengan Desember 1999 alasannya adalah bahwa dengan waktu kurang lebih 10 tahun dirasa cukup untuk mengetahui kebijakan Saddam dalam menghadapi sanksi yang diterapkan di negaranya dan mulai merenggangnya sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam kurun waktu ini juga bisa diamati keberhasilan Saddam dalam menerapkan kebijakannya serta kemampuannya untuk tetap memegang pucuk pimpinan di Irak.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam penulisan ini, penulis keluar dari kurun waktu dan materi yang telah ditetapkan, sepanjang masih ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan pembahasan yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai data pendukung, sehingga gambaran yang diperoleh dalam penulisan ini bersifat lebih komprehensif.

1.3 Permasalahan

Permasalahan yang muncul merupakan dimulainya proses pembahasan guna mencari kesimpulan dari suatu persoalan. Dengan demikian persoalan itulah yang menjadi akar penelitian untuk memecahkan suatu kasus. Winarno Surachmad menyatakan bahwa :

“ Problematika adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui atau dengan jalan mengatasinya. Karena apabila kita berjalan terus, masalah akan menampakkan diri sebagai suatu tantangan.”⁹

Dengan demikian permasalahan adalah kesulitan yang dimaknai sebagai arah suatu pembahasan kritis. Permasalahan menggugah kesadaran penulis untuk mencari jawabannya. Jawaban yang tepat dan akurat akan diperoleh apabila didukung data-data objektif yang memadai.

⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, 1975, hal. 23

Permasalahan yang akan dibahas dalam mencermati fenomena politik yang ada di dalam negeri Irak, terlihat dengan jelas adanya suatu hubungan tarik menarik yang kuat antara diterapkannya sanksi ekonomi PBB dengan keberanian Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein dalam menginvasi wilayah negara Kuwait. Sanksi ekonomi PBB telah membawa Irak pada situasi terisolasi dalam kancah pergaulan internasional dan menggiring rakyat Irak dalam jurang penderitaan yang sangat dalam. Praktis segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan perekonomian di Irak pada akhirnya mereka tangani sendiri, padahal kita ketahui pula bahwa Irak pada masa jayanya dulu, sebelum terjadinya konflik teluk, adalah bangsa yang terkenal akan sumberdaya alamnya yang melimpah, dengan kekayaan terbesarnya adalah minyak bumi, namun dalam hal pemberdayaan sumberdaya manusianya Irak masih dikategorikan berkualitas rendah. Hal ini terlihat dari fenomena kehidupan mereka sebelumnya, di mana ada kecenderungan untuk lebih mengandalkan tenaga kerja asing, seperti dari negara Mesir, Korea Selatan, Filipina, Yaman, bahkan dari Indonesia dalam melakukan kegiatan perekonomian di Irak.¹⁰ Keadaan yang demikian dapat dibayangkan bagaimana beratnya kehidupan rakyat Irak sekarang dalam mempertahankan kelangsungan hidup anak cucu mereka.

Secara teoritis, sanksi ekonomi yang diterapkan di Irak yang sebagian besar dipengaruhi oleh AS adalah dimaksudkan untuk memusnahkan kekuasaan Saddam Hussein dari dalam tubuh Irak sendiri. Amerika Serikat ingin mendongkel Saddam dari posisinya sebagai pemimpin Irak, karena ia dianggap sebagai sosok seorang pemimpin negara Timur Tengah yang sulit bekerjasama dengan negara Barat. Irak adalah salah satu negara yang menolak adanya perjanjian Camp David 1979, yaitu perjanjian antara Mesir, Israel, dan AS. Tetapi segala bentuk usaha untuk menggulingkan kekuasaan Saddam tidak pernah berhasil, karena fakta membuktikan bahwa Saddam masih tetap memperoleh dukungan penuh dari rakyatnya. Saddam dapat membuktikan pada dunia luar bahwa Irak mampu bertahan dalam menghadapi sanksi PBB, meskipun kebijakan-kebijakan yang diterapkannya seringkali menggunakan kekerasan, tetapi sebagian

¹⁰ *Garra*, 28 Oktober 1995

besar rakyat Irak mendukung kepemimpinannya, mereka beranggapan bahwa penderitaan yang mereka alami bukan akibat dari kepemimpinan Saddam yang keras, melainkan karena sanksi yang diterapkan oleh PBB.

Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut : **“Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Saddam Hussein dalam memimpin Irak menghadapi sanksi PBB pasca Perang Teluk II ?”**

1.4 Kerangka Dasar Teori

Pada hakekatnya tinjauan pustaka dapat membantu menentukan arah dan tujuan penelitian, di samping untuk dapat memilih konsep yang sesuai dengan permasalahan sehingga dapat dipergunakan untuk memahami segala permasalahan yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan rumusan pengertian teori yang dikemukakan oleh Garwin Mc Nain dan Edwin Segal yang menyatakan bahwa teori merupakan :

“ Serangkaian statement yang saling berkaitan(yang terdiri dari) : 1. kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep dasar teori tersebut; 2. kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain; 3. kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyektif pengamatan empiris (yaitu hipotesis)”.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dalam membahas permasalahan yang telah diajukan akan menggunakan teori pengambilan keputusan (Decision Making Theory) yang dikemukakan oleh Graham T. Allison. Menurutnya terdapat tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan, yaitu aktor rasional, proses organisasi, dan politik birokratis.¹²

Aktor rasional yang merupakan model I memandang politik luar negeri sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu tujuan pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Jadi

¹¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 187

¹² *Ibid*, hal. 234-238

unit analisa model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian analisis politik harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.

Dalam model ini digambarkan bahwa dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu, para pembuat keputusan menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu selalu siap melakukan perubahan atau penyesuaian di dalam kebijaksanaan ini. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Model proses organisasi yang merupakan model II menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi pusat yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukanlah semata-mata proses intelektual, tetapi lebih merupakan proses mekanis, yaitu pembuatan keputusan dilakukan secara mekanis yang merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Inilah pola perilaku yang disebut prosedur kerja baku.

Pada dasarnya model ini mengajukan tiga proposisi. Pertama, suatu pemerintahan terdiri dari sekumpulan organisasi-organisasi yang secara longgar bersekutu dalam struktur hubungan yang mirip struktur feodal. Kedua, keputusan dan perilaku pemerintah bukanlah hasil dari proses penetapan pilihan secara rasional, tetapi sebagai output hasil kerja organisasi-organisasi besar yang bekerja menurut suatu pola perilaku baku. Ketiga, setiap organisasi yang memiliki prosedur kerja baku dan program serta bekerja rutin, umumnya akan berperilaku sama seperti perilakunya di masa sebelumnya. Proses yang semi mekanistik ini mempengaruhi keputusan yang dibuat maupun penerapan keputusan itu.

Model politik-birokratis memandang pembuatan keputusan sebagai hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi. Hal ini melibatkan berbagai permainan tawar menawar di antara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan adalah proses sosial bukan proses intelektual.

Apabila proses pembuatan keputusan menurut Model I adalah proses intelektual, dan Model II adalah proses mekanis, maka menurut Model III proses pembuatan keputusan adalah proses politik. Jadi dalam Model III digambarkan suatu proses di mana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional. Setiap pemain, seperti presiden, para menteri, penasehat, jenderal, anggota parlemen, dan lain-lainnya berusaha menetapkan tujuan, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan melalui suatu proses intelektual. Masing-masing memiliki pamrih yang berbeda terhadap isu yang diperdebatkan. Dengan demikian, unit analisa dalam Model III adalah tindakan-tindakan pejabat pemerintahan dalam rangka menerapkan wewenang pemerintah yang bisa dirasakan oleh mereka yang ada di luarnya.

Saddam Hussein dalam menentukan kebijakan di Irak didasarkan pada situasi yang melanda Irak sebagai akibat diterapkannya sanksi Dewan Keamanan PBB. Sebagai aktor negara, idealnya kebijakan yang diambilnya berdasarkan pada kepentingan rakyat dan tujuan yang hendak dicapai negaranya serta merupakan reaksi dari adanya kehidupan politik yang melanda Irak. Kondisi Irak yang sangat memprihatinkan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan yang akhirnya mempengaruhi kepemimpinan Saddam dijadikan dasar bagi Saddam di dalam membuat kebijakan-kebijakan. Maka teori pengambilan keputusan yang dikemukakan Graham T. Allison model aktor rasional dan proses politik ini sesuai dengan apa yang dilakukan Saddam.

Apabila kita hendak memahami fenomena sosial, maka perlu kiranya untuk penyederhanaan fenomena tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti. Penyederhanaan fenomena itu berkaitan dengan konseptualisasi, karena ilmuwan menyederhanakan fenomena tersebut dengan menggunakan konsep. Konsep-konsep ini digunakan untuk mengorganisasikan persepsi yang muncul dan untuk

membangun model yang dipakai untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam masyarakat termasuk hubungan internasional.¹³

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat objek atau fenomena tertentu. Tiap disiplin ilmu akan mengembangkan serangkaian konsep-konsep yang relevan dengan bidang ilmu tersebut. Hal ini akan memudahkan mereka yang mengkaji disiplin ilmu tersebut untuk mengkomunikasikan hasil pemikirannya kepada orang lain yang juga tertarik dengan ilmu yang sama. Konsep juga bisa berfungsi memperkenalkan suatu cara mengamati fenomena empiris. Hal ini memungkinkan seorang ilmuwan memberi definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep itu dan menggunakan konsep itu sesuai dengan makna yang didefinisikan.¹⁴

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Saddam pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan adanya krisis legitimasi atas kewenangannya sebagai pemegang tampuk pemerintahan tertinggi Irak pasca penerapan embargo ekonomi PBB. Karena kondisi yang terjadi di Irak sangat mempengaruhi tingkat simpati rakyat terhadapnya. Apabila Saddam mampu membawa rakyat Irak keluar dari kemelut yang mereka alami, maka kepercayaan rakyat terhadap Saddam akan semakin besar, dan kelangsungannya di dalam pucuk pimpinan di Irak akan terus terjaga. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan konsep legitimasi di dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein.

Konsep legitimasi sangat berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan seorang pemimpin. Menurut Ramlan Surbakti legitimasi dinyatakan sebagai suatu bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Pada masa awal pembentukan legitimasi, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin lebih ditentukan yang dipimpin, karena penerimaan dan pengakuan kewenangan hanya dapat berasal dari yang diperintah. Namun pada masa selanjutnya, bila bentuk legitimasi telah didapat oleh seorang pemimpin maka

¹³ *Ibid*, hal. 93

¹⁴ *Ibid*, hal. 95

hubungan antara keduanya lebih dicitrakan oleh yang memimpin, sebab pihak yang berwenang untuk memerintah dapat memaksakan keputusannya terhadap masyarakat dan masyarakat wajib untuk mentaati kewenangan tersebut.¹⁵

Di sisi lain legitimasi merupakan keutamaan yang dibenarkan atau diterima bawahan, termasuk pelaksanaan politik di dalam wewenang yang sah.¹⁶ Legitimasi merupakan faktor fundamental yang akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan perubahan sosial serta membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang kesejahteraan yang hendak ditangani tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.¹⁷

Kestabilan politik memungkinkan pemerintah menjalankan program-programnya sekaligus merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara dengan memperluas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan akan memperkokoh legitimasi yang diterima pemerintah dari masyarakat. Dengan legitimasi itu pula bisa dicegah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak puas dengan perubahan keadaan. Sehingga legitimasi merupakan sarana untuk meredam tindakan anarkis dalam masyarakat.

Sebuah pemerintahan dikatakan memiliki legitimasi apabila rakyat yang menerima perintahnya yakin bahwa struktur, prosedur, tindakan, kebijakan, dan pejabat pemerintah memiliki kualitas "benar", layak, atau memiliki kabaikan moral untuk membuat aturan-aturan yang mengikat. Oleh karena itu para pemimpin dalam sebuah sistem politik berusaha memindahkan pengaruh mereka menjadi wewenang sehingga legitimasinya menjadi luas dan penting artinya.¹⁸

Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki legitimasi, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki legitimasi. Apabila kekuasaan politik merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, maka kewenangan merupakan hak moral

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hal. 92 - 100

¹⁶ Jack C. Plano, Robert E. Riggs, dan Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 121

¹⁷ Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hal. 98 - 99

¹⁸ Robert Dahl, *Analisa Politik Modern*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal. 70 - 71

untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.¹⁹ Hal ini dilakukan agar program pemerintah dapat berjalan, diterima, dan mendapatkan umpan balik seperti yang diharapkan. Dengan demikian rakyat akan berkeyakinan bahwa kepentingannya terwakili, sehingga akan menambah kadar legitimasi pemerintah dalam masyarakat.

Legitimasi berkaitan erat dengan kekuasaan normatif dan kualitas pribadi.²⁰ Kekuasaan normatif merupakan kekuasaan yang diperoleh melalui norma yang berlaku dalam masyarakat yang telah menjadi adat dan tradisi. Termasuk di dalamnya pemimpin agama yang mendapat kepatuhan dan kebenaran agama yang disebarluaskannya. Dengan kata lain kekuasaan normatif mencerminkan sebagai apa yang ada dalam masyarakatnya. Di samping itu sebagian anggota masyarakat mentaati kewenangan pemerintah karena kesadaran hukum demi ketertiban umum dan pencapaian tujuan bermasyarakat bernegara.²¹

Sedangkan kualitas pribadi ditentukan oleh kualitas pemimpin pemerintahan. **Sergiovanni dan Corbally** menyatakan bahwa untuk menjadi pemimpin harus memenuhi tiga syarat, yaitu: popularity, acceptability, dan capability.²²

- a. **Popularity**, menunjuk pada dikenal atau tidaknya sang pemimpin dalam masyarakat.
- b. **Acceptability**, menunjuk pada penerimaan masyarakat terhadap seorang tokoh politik. Penerimaan ini akan muncul apabila ia dapat menyuarakan aspirasi masyarakat.
- c. **Capability**, merupakan kemampuan intelektual tokoh politik, kemampuan menyerap aspirasi rakyat, merumuskannya ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyatnya.

Di antara tiga syarat di atas, popularitas adalah hal utama dan paling mendasar jika keadaan negara kurang stabil. **Arbi Sanit** menyatakan bahwa

“Di masa krisis kebutuhan akan popularitas yang ditopang oleh kemampuan politis jauh lebih besar dari pada dalam keadaan normal

¹⁹ Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hal 85

²⁰ *Ibid*, hal. 92

²¹ *Ibid*, hal 95

²² Riswandha Imawan, *Membedah Politik Ode Baru: Catatan dari Kaki Merapi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 30

Pemerintahan populer akan didukung oleh mayoritas karena tokoh-tokohnya dikenal oleh masyarakat luas. Di samping itu pemerintahan itu dipercaya mampu secara politis maupun teknis menangani masalah, sehingga pemerintah itu menjadi kokoh dan berwibawa. Yang pada akhirnya mempengaruhi rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani permasalahan yang timbul. Pemerintahan populer tetap saja didukung oleh mayoritas rakyat walaupun belum tentu bisa memenuhi kepentingannya. Rakyat bersedia menunggu hasil pemecahan masalah yang ditangani pemerintah.

Pada masyarakat yang labil sistem politiknya adalah menjadi keharusan bagi yang memerintah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok sosial yang mempunyai kekuatan potensial, seperti militer, birokrasi, golongan agama, tuan tanah dan intelektual. Sedangkan massa tidak memiliki kekuatan. Dalam kondisi tersebut, fenomena munculnya legitimasi yang diperoleh Saddam pada saat Irak diembargo PBB merupakan suatu ilustrasi yang tepat. Saddam membuat kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepada rakyatnya agar dapat keluar dari kondisi yang serba sulit. Kebijakan Saddam ini semakin diterima oleh rakyat karena didukung oleh kekuatan militer dan media massa yang sangat dikuasai oleh pemerintah.

1.5 Hipotesis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diperlukan hipotesis sebagai jawaban sementara. Hipotesis dipakai sebagai bahan perbandingan dalam membuat kesimpulan. Hipotesis akan mengarahkan bagaimana proses kajian teoritis akan dibahas dan menghindari kebutaan atas permasalahan yang dibahas.

²³ Arbi Sanit, *Pemerintahan Populer*, Ummat, no. 46 tahun III, 8 Juni 1998, hal. 60

Menurut Winarno Surachmad, hipotesis adalah "Suatu perumusan jawaban sementara terhadap suatu persoalan. Menurutnya hipotesis yang baik adalah hipotesis yang secara logis berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang diteliti. Hipotesis hendaklah jelas, sederhana dan terbatas. Kesederhana ini dimaksudkan untuk mengurangi salah paham yang timbul dari perbedaan pengertian. Terbatas dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai luas dan dalamnya masalah yang diselidiki, selain itu hipotesis yang baik hendaknya dapat diuji."²⁴

Berakhirnya Perang Teluk II membawa kondisi dalam negeri Irak benar-benar mengalami kemerosotan yang tajam dan sangat memprihatinkan. Keadaan yang demikian bertitik tolak dari akibat penerapan sanksi PBB yang salah satunya adalah pengisolasian Irak dalam pergaulan internasional. Dengan pengisolasian ini rakyat Irak harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Perkembangan situasi yang demikian memprihatinkan, sebagai aktor yang paling paham dalam mengamati setiap gejala-gejala politik, ekonomi, dan sosial budaya di negerinya, Saddam Hussein mengkondisikan situasi ini sebagai situasi yang sangat potensial dalam menggulingkan kekuasaannya, karena terkait dengan kepercayaan rakyat atas kepemimpinannya. Hal ini merupakan tugas besar bagi Saddam untuk mengatasi kondisi tersebut dan mengarahkan pada situasi yang menguntungkan bagi masa depan pribadi dan rakyatnya.

Berdasarkan pemikiran di atas selanjutnya penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

"Bahwa upaya Saddam Hussein dalam memimpin Irak menghadapi sanksi PBB pasca Perang Teluk II adalah dengan menempuh langkah kongkret yang antara lain meliputi pembangunan bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik pemerintahan serta penguatan legitimasinya sebagai pemimpin Irak".

²⁴ Winarno Surachmad, *op. cit.*, hal. 39

1.6 Metode Penelitian

Tujuan pokok setiap penelitian adalah menerangkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, seorang peneliti dituntut agar memahami fenomena-fenomena yang terjadi, dengan jalan menghubungkan antara peristiwa yang satu dan yang lainnya. Dengan kata lain seorang peneliti harus dapat mengumpulkan data-data kemudian menganalisisnya. Kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data inilah yang disebut dengan metode.

Menurut **The Liang Gie**, definisi metode adalah:

“Cara atau langkah yang berulang-ulang, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai masalah tersebut”.²⁵

Jadi metode merupakan rancangan teknis untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Di dalam analisis data hipotesis dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian metode merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam proses pengumpulan data adalah metode observasi melalui riset kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini langkah yang diambil adalah melengkapi literatur yang relevan dengan kajian penulisan karena pada dasarnya dibutuhkan data yang lengkap dalam penulisan studi kasus.²⁶ Dalam melakukan studi literatur penulis mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, majalah, dan lain-lain.

Pada tahap ini penulis tidak melakukan penelitian secara langsung, tapi dengan menggunakan data-data sekunder, yaitu melalui bahan-bahan tertulis dengan tidak hanya mengandalkan buku-buku ilmiah tetapi juga dari artikel-artikel, majalah, surat kabar, internet, maupun terbitan-terbitan lainnya semacam

²⁵ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1974, hal. 130

²⁶ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.

jurnal maupun laporan-laporan berkala yang diterbitkan oleh suatu lembaga.

Adapun sumber-sumber data yang menjadi sasaran adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan pusat Universitas Jember.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
3. Koleksi pribadi.
4. Internet.

1.6.2 Metode Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data usai, selanjutnya adalah proses analisa data. Proses analisa data yang terarah akan menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah. Definisi tentang analisa data, salah satunya dikemukakan oleh The Liang Gie yaitu sebagai berikut:

“Sege nap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri dari masing-masing bagian, hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu”.²⁷

Jadi analisis data merupakan kajian yang seksama terhadap suatu fenomena yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang menyebabkan suatu fenomena itu terjadi. Analisis data diperlukan untuk memperoleh validitas, signifikansi dan konsistensi atas data-data yang diperoleh yang dihubungkan dengan kerangka dasar teori yang digunakan.

Mengingat sifat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung, metode analisa data yang dipergunakan secara kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh hasil analisa yang baik, maka penulis akan menggunakan metode berfikir deduktif.

Definisi mengenai berfikir deduktif menurut Sutrisno Hadi yaitu:

“Apa yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu”.²⁸

²⁷ The Liang Gie, *op. cit.*, hal. 29

²⁸ Sutrisno Hadi, *op. cit.*, hal. 36

Hal ini berarti bahwa cara berfikir deduktif berangkat dari peristiwa dalam skala luas atau umum yang dikenakan pada peristiwa yang sifatnya khusus.

Cara berpikir deduktif penulis pilih sebagai landasan hipotesis. Keterkaitan antara cara berpikir deduktif dengan upaya Saddam Hussein dalam memimpin Irak menghadapi sanksi PBB pasca Perang Teluk II adalah bahwa dalam mengambil kebijakan, Saddam didasarkan pada situasi yang terjadi di Irak, di mana situasi Irak sangat memprihatinkan akibat diberlakukannya embargo ekonomi, seperti banyaknya kemiskinan, karena rakyat Irak tidak mampu untuk membeli kebutuhan yang harganya melangit karena tingginya inflasi, sehingga Saddam menerapkan kebijakan bidang ekonomi, politik pemerintahan, serta penguatan legitimasinya sebagai pemimpin Irak.

1.7 Pendekatan

Pendekatan diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Pendekatan berkaitan dengan penggambaran kita mengenai suatu peristiwa, yaitu dari sisi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut.

The Liang Gie mengatakan bahwa pendekatan adalah :

“Keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.”²⁹

Dalam menjawab permasalahan mengenai sejauh mana upaya yang dilakukan Saddam dalam memimpin Irak menghadapi sanksi PBB pasca Perang Teluk II, maka penulis menggunakan pendekatan berupa **political history**. Political history merupakan suatu pendekatan yang melihat ataupun memahami gejala-gejala politik yang muncul dengan berdasar pada proses sejarahnya.

Pemahaman terhadap suatu kejadian atau fenomena akan lebih mudah apabila kita mengetahui latar belakang atau kejadian-kejadian yang mendahului timbulnya fenomena tersebut.

²⁹ The Liang Gie, *op. cit.*, hal. 103

Eisenmann memberikan perumusan mengenai political history, bahwa political history adalah:

“Suatu deskripsi kronologis dari kenyataan politik berbagai hal, baik itu bersifat institusional maupun non-institusional dalam kehidupan suatu negara (sosial politik) dalam pertimbangan kebijakan dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan negara lain atau pada luar negeri atau kebijakan internasional.”³⁰

Politik dan sejarah memiliki kaitan yang sangat erat, keduanya saling mempengaruhi dan melengkai untuk perkembangan kedua unsure tersebut. Segala peristiwa politik dipengaruhi oleh proyeksi sejarah baik dalam hubungannya dengan sejarah masa kini maupun masa depan yang tidak terlepas dari situasi masa lalu sejalan dengan perjalanan waktu.

Alasan penggunaan pendekatan political history bagi penulis adalah agar dapat menemukan gambaran yang belum jelas mengenai segala hal yang berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Saddam dalam mengatasi krisis yang terjadi di Irak sebagai akibat diterapkannya sanksi PBB. Dari sini penulis bisa menelusuri dan melakukan pengamatan terhadap langkah-langkah yang diambil Saddam di dalam memimpin Irak menghadapi sanksi PBB pasca Perang Teluk II.

³⁰ *Ibid.*, hal. 87

KONFLIK IRAK DAN KUWAIT SEBAGAI PENYEBAB PERANG TELUK II

2.1 Latar Belakang terjadinya Konflik

Timur Tengah merupakan wilayah yang tidak lepas dari sorotan dunia luar. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kekayaannya akan minyak bumi, tetapi juga karena kehidupan politik pemerintahan yang terjadi. Kehidupan politik pemerintahan di Timur Tengah sering berada dalam posisi yang labil, karena banyak negara-negara yang bertikai mempersoalkan masalah perbatasan, perbedaan kekayaan minyak yang dimiliki, maupun masalah-masalah yang lain. Segala bentuk upaya telah banyak dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi, yaitu berupa perundingan dan dengan pembentukan perjanjian-perjanjian bersama.

Pan-Arabisme atau nasionalisme bangsa Arab adalah sebuah doktrin yang menghendaki adanya bangsa dan negara Arab yang satu. Secara umum nasionalisme Arab muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme. Tetapi, dalam perkembangannya, nasionalisme Arab ini hanya merupakan ideologi atau tepatnya obsesi negara-negara Arab "radikal" seperti Libya, Irak, Suriah, Yaman, dan Aljazair.

Sebagaimana diketahui, dalam 10 - 15 tahun terakhir ini, dunia Arab terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu "moderat" dan "radikal". Kubu pertama yang merupakan kelompok "mapan" terdiri dari negara-negara Arab yang cenderung mempertahankan status quo peta politik di kawasan ini dan dimotori oleh rezim-rezim monarki kaya minyak serta para sekutu mereka yang dari segi ekonomi, politik, dan militer sangat bergantung pada Barat, khususnya Amerika Serikat. Sedangkan kubu kedua terdiri dari negara-negara Arab yang menginginkan adanya perubahan.³¹

³¹ Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 1991, hal.164

Percaturan politik di dunia Arab hampir tidak pernah terlepas dari konflik antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Konflik tersebut mulai tajam sejak penandatanganan *Perjanjian Camp David* antara Mesir, Israel, dan AS tahun 1979. Pada saat itu mulai populer nama-nama para pemimpin Arab 'radikal' seperti Muammar Qadhafi, Hafiz al-Asad, Saddam Hussein, dan Yasser Arafat yang berhasil menggalang aliansi anti Mesir, sehingga setelah menandatangani *Perjanjian Camp David*, Mesir di bawah pemerintahan Anwar Sadat dikucilkan dari dunia Arab dan Islam.

Aliansi-aliansi politik dalam perkembangan selanjutnya baik dari kubu 'radikal' maupun 'moderat' bersifat tidak konsisten dengan tujuannya. Aliansi-aliansi ini tidak lebih dari sekadar kebutuhan politik sesaat, tergantung pada kepentingan politik yang ada saat itu. Hal ini seperti yang dilakukan Saddam Husein sewaktu terlibat perang melawan Iran (1980-1988) yang terpaksa harus bersikap 'moderat' guna memperoleh dukungan dari Mesir dan rezim-rezim monarki. Namun demikian banyak juga yang berpendirian teguh pada prinsip-prinsipnya untuk bersikap 'radikal' maupun 'moderat'. Sikap politik moderat maupun radikal sangat dipengaruhi oleh sikap politik seorang pemimpin terhadap bangsa Barat khususnya AS yang banyak andil dalam perputaran roda pemerintahan di Timur tengah.

Konflik intra-Arab yang terjadi selama ini termasuk krisis teluk menunjukkan betapa sulitnya merealisasikan gagasan nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab akan tetap sekadar gagasan dan cita-cita saja. Karena negara-negara Arab lebih disibukkan oleh urusan sengketa dengan tetangga, masalah perbatasan, dan perbedaan kemakmuran akibat hasil minyak, sehingga pan-Arabisme tidak lebih dari sekadar slogan yang telah kehilangan makna yang sebenarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perang yang terjadi di Timur Tengah, baik dalam skala besar maupun kecil. Sejak 1948 paling tidak terjadi tujuh perang skala besar, yaitu Perang Arab-Israel 1948, Perang Yom Kippur 1973, Perang Suez 1956, Invasi Enam Hari Israel 1948, Perang Irak-Iran 1980-1988, Invasi Israel ke Libanon 1982, dan konflik Irak-Kuwait yang mengakibatkan terjadinya perang Irak-Multinasional. Sedangkan dalam skala

kecil seperti serangan Israel ke reaktor nuklir Irak di Osirak, konflik Yaman, konflik perbatasan Mesir-Sudan, konflik Arab-Yaman, konflik Palestina-Israel, dan lain-lain.³²

Konflik antara Irak dan Kuwait yang pada akhirnya berkembang menjadi perang Irak melawan pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika Serikat bermula dari terjadinya perselisihan antara Irak dan Kuwait yang disusul dengan terjadinya invasi pasukan Irak ke Kuwait 2 Agustus 1990, aneksasi Irak atas Kuwait 8 Agustus 1990 di mana Kuwait dijadikan sebagai “provinsi ke-19” Irak, dan menyusul terjadinya pengeboman besar-besaran pasukan multinasional terhadap Irak dan Kuwait.³³ Konflik ini pada intinya dilatarbelakangi oleh faktor sejarah geografis, kepentingan ekonomi Irak, dan ambisi Saddam menjadi pemimpin dunia Arab.

2.1.1 Segi Sejarah Geografis

Republik Irak yang mempunyai luas wilayah 443.000 km² merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang tinggi nilai peradabannya. Kota-kotanya yang besar adalah Baghdad, Basra, Mosul, dan Kirkuk, dengan bahasa resminya bahasa Arab. Perbatasan geografis Irak yang dapat dikatakan tidak memiliki batas yang jelas, menjadikan suatu masalah tersendiri bagi pemerintahan yang ada. Di sebelah timur, Irak berbatasan dengan Iran, di sebelah utara dengan Turki, di sebelah barat dengan Suriah dan Yordania, dan di sebelah selatan dengan Saudi Arabia dan Kuwait. Sehingga tidak mengherankan jika masing-masing negara tersebut saling bertikai memperlmasalahkan perbatasan negaranya. Terlebih lagi negara-negara tersebut dulunya berada di bawah satu kekuasaan Dinasti yang sama.

³² Sidik Jatmika, *Membongkar Politik Standart Ganda Amerika Serikat*, Bigraf, Yogyakarta, 2000, hal. 183 - 184

³³ Riza Sihbudi, *Indonesia Timur Tengah Masalah dan Prospek*, Gema Irsani Press, Jakarta, 1997, hal. 79

Kuwait adalah sebuah negara kesultanan kecil yang luasnya hanya 17.819 km² dengan jumlah warga negaranya hanya sekitar 767 ribu jiwa. Dengan pendapatan per-kapita tertinggi di dunia.³⁴ Kuwait terletak di sebelah tenggara Irak tepatnya dekat dengan kota Basra yang merupakan salah satu kota besar di Irak. Kuwait memiliki kemerdekaan penuh yang diperoleh dari Inggris tahun 1961.³⁵ Kuwait memperoleh kemerdekaan dari Inggris karena Kuwait merupakan negara protektorat Inggris Raya. Emir Kuwait meminta Inggris untuk menjamin keamanan Kuwait dari ancaman penguasaan Irak. Tetapi, karena letaknya yang dekat dengan Irak, Kuwait seringkali diklaim sebagai wilayah Irak, terlebih dengan kekayaan yang dimilikinya.

Irak merupakan pusat dari peradaban Mesopotamia, jaman di mana kota Baghdad terkenal sebagai “kota 1001 malam”. Di bawah kekuasaan Raja Nebuchadnezzar, Mesopotamia berada di puncak kejayaan. Nebuchadnezzar pada masanya dikenal sebagai “raja perang” karena keberhasilannya mendominasi kawasan Timur Tengah dengan jalan kekerasan.³⁶ Keberhasilan Nebuchadnezzar ini nampaknya akan diikuti oleh Saddam dalam memimpin Irak. Ia kemudian melakukan penyerangan kepada Kuwait guna menguasai ladang minyak Rumaila dan dua pulau Warba dan Bubiyan yang berdekatan dengan perbatasan Irak-Kuwait, serta menjadikan Kuwait sebagai propinsi ke-19 Irak.

2.1.2 Kepentingan Ekonomi Irak

Dua tahun sebelum Irak menyerang Kuwait, Irak baru saja keluar dari konflik dengan Iran, negara tetangganya. Perang antara Irak-Iran ini dikenal dengan Perang Teluk I, yang berlangsung selama 8 tahun. Kondisi infra-struktur ekonomi Irak akibat berkobarnya Perang Teluk I porak poranda. Untuk membangunnya kembali Saddam harus memulainya dari nol, karena Irak hampir “tenggelam” oleh pinjaman uang dan penuh oleh dua juta orang pekerja asing guna menjalankan roda ekonomi negara tersebut. Menurut ekonom Inggris,

³⁴ Jawa Pos, 4 Agustus 1990

³⁵ Suara Pembaruan, *Perang Teluk Malapetaka Dunia*, PT Media Interaksi Utama dan PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal. 11

³⁶ Riza Sihbudi, 1991, *op. cit.*, hal. 153

Kamran Mofid, kerugian total Irak akibat perang berkepanjangan mencapai 452.6 milyar dollar AS.³⁷ Angka ini merupakan jumlah keseluruhan dari nilai kenaikan infra struktur ekonomi, utang luar negeri, serta kerugian sektor lainnya, seperti merosotnya GNP dan pendapatan ekspor minyak. Padahal pendapatan tertinggi Irak yang biasa dicapai dari hasil produksi minyak tidak lebih dari 12 milyar dollar AS per tahun. Sehingga produksi minyak di negara ini walaupun dinaikkan dari 3.5 juta barel per hari menjadi 4 juta barel per hari tidak mampu lagi mendukung usaha perbaikan ekonomi negara tersebut.

Selama perang melawan Iran, Kuwait menyuntik dana milyaran dollar AS ke Baghdad. Sejak perang delapan tahun ini Irak meningkatkan jumlah kekuatan militernya, dari 242.250 tentara menjadi hampir 1.200.000 tentara, jumlah ini merupakan angkatan darat terbesar ke-4 di dunia.³⁸ Sehingga jumlah utang luar negeri Irak membengkak termasuk pinjaman sebesar 14 milyar dollar AS dari Kuwait. Sementara utangnya pada negara-negara teluk lainnya diperkirakan mencapai 16 milyar dollar AS. Utang Irak pada negara-negara Barat dan Jepang mencapai 25 milyar dollar AS, belum lagi ditambah dengan utang pembelian senjata dari Uni Soviet yang jumlahnya antara 6 sampai 9 milyar dollar AS.³⁹

Dengan kondisi ekonomi yang sangat hancur ini, pemerintahan Saddam berusaha membangun kembali infra struktur ekonominya serta bidang-bidang yang lain, tetapi di tengah Irak membangun negaranya muncul masalah baru mengenai harga minyak yang merosot tajam. Padahal minyak merupakan komoditi utama bagi perekonomian Irak, sehingga hal ini merupakan pukulan yang tajam bagi pemerintahan Saddam Hussein.

Pada hari ulang tahun ke-23 kekuasaan Partai Baath, 17 Juli 1990, Saddam menyatakan bahwa sebagian negara Arab telah menjalankan kebijakan perminyakan yang menikam Irak dari belakang. Kuwait dan Uni Emirat Arab telah melanggar quota produksi minyak yang telah ditetapkan OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) yaitu organisasi negara-negara

³⁷ *Ibid*, hal. 151

³⁸ Adji Samekto, *Perang Teluk*, (online).

(<http://www.pakta.org/news/viewArsip.asp?cat=Militer&ArsipID=1458.html>)

³⁹ Suara Pembaruan, *op.cit.*, hal. 15

pengekspor minyak. Sehingga tindakan Kuwait dan Uni Emirat Arab mengakibatkan *over production* yang menimbulkan harga minyak selalu rendah. Akibat pelanggaran yang dilakukan Kuwait dan Uni Emirat Arab harga minyak anjlok dari 20.5 dollar AS per barel pada awal Januari 1990 menjadi 13.6 dollar AS per barel pada Juni 1990.⁴⁰ Sehingga Irak yang mengandalkan minyak sebagai komoditas utamanya sangat terpukul dengan anjloknya harga minyak di pasaran internasional. Menurut Irak, setiap penurunan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barel akan mengurangi penerimaan Irak sebesar 1 milyar dollar AS, sehingga Irak memperkirakan kerugian sebesar 14 milyar dollar AS akibat jatuhnya harga minyak.

Alasan kedua Saddam menyerang Kuwait adalah bahwa dengan menguasai Kuwait berarti Irak juga menguasai kekayaan minyak yang ada di dalamnya yang dapat dipergunakan untuk membangun ekonominya. Di samping itu Saddam juga menuduh Kuwait telah 'mencuri' minyak Irak di daerah Rumaila, daerah yang dipersengketakan antara Irak-Kuwait karena kekayaan minyak yang ada di sana. Hal ini dilakukan Kuwait pada saat Irak perang selama delapan tahun dengan Iran. Jumlah minyak yang diambil Kuwait diperkirakan senilai 2.4 milyar dollar AS.⁴¹

Sebelum Irak menyerang Kuwait tepatnya menjelang pembukaan sidang OPEC di Jenewa tanggal 25 Juli 1990, Irak telah memperingatkan Kuwait dan Uni Emirat Arab mengenai masalah pelanggaran quota produksi minyak. Peringatan Irak ini mampu mengubah kedudukan harga minyak. Karena di dalam sidangnya, OPEC memutuskan untuk menaikkan harga minyak dari 18 dollar AS menjadi 21 dollar AS per barelnya.

2.1.3 Ambisi Saddam Hussein Menjadi Pemimpin Dunia Arab

Konflik yang sering terjadi di negara Arab memicu lahirnya pemimpin-pemimpin besar. Pemimpin-pemimpin ini ada yang bersikap "moderat" ataupun "radikal". Pemimpin yang bersikap radikal selalu menginginkan adanya

⁴⁰ *Time*, 6 Agustus 1990, hal. 30-32

⁴¹ Riza Sihbudi, 1991, *op cit.*, hal. 28

perubahan dan mereka umumnya tidak mau bekerja sama dengan pihak Barat, khususnya Amerika Serikat. Mereka menginginkan adanya perubahan tanpa campur tangan pihak luar. Salah satu pemimpin negara Arab yang bersikap radikal adalah Saddam Hussein.

Saddam Hussein lahir pada 28 April 1937 di daerah Tikrit, daerah yang mayoritas penduduknya pemeluk Islam Sunni. Ayahnya meninggal dunia sembilan bulan kemudian dan semenjak itu dia dipelihara oleh ayah tirinya yang sama sekali tidak menyayanginya. Saddam kecil bersekolah pada umur 10 tahun setelah dia tinggal bersama pamannya, seorang guru di Baghdad, Khayrallah Tulfah. Pamannya ini adalah mantan serdadu yang dipecat oleh penjajah Inggris karena mendukung kudeta pro Nazi pada tahun 1941.

Nama Saddam Hussein muncul pertama kalinya dalam dunia politik Irak pada paruh kedua tahun 1970-an. Saddam masih termasuk dalam jajaran keluarga terdekat Presiden Hasan Al-Takriti, karena ia masih keponakannya yang sama-sama berasal dari keluarga Al-Takriti dari desa Tikrit. Presiden Hasan Al-Takriti atau dikenal sebagai Ahmad Hasan al Bakr merupakan pemimpin pertama Partai Ba'ath, yang merupakan pencetus lahirnya ideologi Ba'athisme yang berintikan ajaran sosialisme, persatuan Arab, dan kebebasan (*freedom*). Saddam mengawali karier politiknya dalam peranan yang tidak begitu menonjol, yakni sebagai wakil ketua Dewan Komando Regional Partai Ba'ath Irak sekaligus sebagai wakil ketua Dewan Komando Revolusioner Irak. Karena alasan kesehatan, al Bakr akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Saddam Hussein pada 16 Juli 1979 yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden.

Tahun pertama kepemimpinan Saddam di Irak, Saddam sudah menunjukkan model kepemimpinan yang keras. Ia tidak segan-segan menghalalkan segala cara demi memperkuat posisi kekuasaannya. Di dalam negeri ia menghukum mati siapa saja yang di anggap akan mengganggu keamanan kepemimpinannya. Seperti pemimpin umat Syi'ah Irak, Imam Baqir al Shadr yang di hukum mati karena dituding hendak "mengimpor" revolusi Islam Iran dan

puluhan anggota serta pimpinan Partai Ba'ath yang merupakan partainya sendiri, yang dicurigai hendak merebut kekuasaan atau tidak menyetujui kebijakannya.⁴²

Saddam Hussein sangat menguasai militer dan media massa, sehingga opini publik yang berkembang dapat dikontrol oleh pemerintahan Saddam. Dengan penguasaan total atas keduanya, Saddam Hussein bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya di dalam negeri. Setiap pikiran atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan penguasa dengan mudah dihancurkan melalui kekerasan atau ancaman fisik militer dan oleh opini yang dipublikasikan pemerintah. Sehingga hal ini membawa Saddam sebagai orang nomor satu di Irak.⁴³

Ambisi Saddam untuk menjadi "Pemimpin Dunia Arab" yang ditunjukkan ke negara lain, antara lain dengan membatalkan secara sepihak perjanjian Algiers 1975, yang merupakan perjanjian perdamaian Iran-Irak yang ditanda tangani Saddam dan Syah Iran. Kemudian menyerbu Republik Islam Iran yang waktu itu usianya belum genap dua tahun. Dengan menyerbu Iran waktu itu, Saddam ingin diakui sebagai "pahlawan dunia Arab" yang telah berhasil membendung pengaruh revolusi Islam Iran ke negara-negara Arab sekitarnya.⁴⁴

Perang delapan tahun Irak melawan Iran membuat Irak menjadi negara paling kuat di antara negara-negara Arab dalam hal kekuatan militernya. Meskipun dalam bidang ekonomi, Irak dalam keadaan porak poranda, namun tidak demikian dalam kekuatan militernya. Mulai dari jumlah pasukan, tank, pesawat tempur, sampai pada rudal dan roket yang dimilikinya. Rudal Exocet, East Wind, Silk Warm, Scud, Al-Husein, Al-Abbas, Tammaus dengan jangkauan 315 km, 700 km, 980 km, sampai 2200 km merupakan militer milik Irak yang sangat canggih di tambah dengan adanya roket Al-'Abid.⁴⁵ Kekuatan militer Irak yang besar ini, mendukung Saddam mencapai ambisinya menjadi tokoh yang

⁴² Riza Sihbudi, 1991, *op.cit.*, hal. 150

⁴³ *Suara Pembaruan*, 20 Januari 1995

⁴⁴ *Ibid*, hal. 153

⁴⁵ Amien Rais, *Timur Tengah dan Krisis Teluk Sebuah Analisa Kritis*, CV. Amar Press, Surabaya, 1990, hal. 43

terkuat, terbesar, dan terhebat di Timur Tengah. Karena itu ia tidak ingin adanya saingan di dalam mewujudkan ambisinya.

Saddam mengklaim dirinya sebagai keturunan Nebuchadnezzar, Raja Mesopotamia yang menguasai seluruh jazirah Arab pada 630-562 SM. Pada masanya, Nebuchadnezzar dikenal sebagai “Raja Perang” karena keberhasilannya mendominasi kawasan Timur Tengah dengan jalan kekerasan. Saddam nampaknya ingin mengikuti jejak “moyangnya” itu. Sehingga ia merasa tidak senang dengan keberhasilan presiden Mesir Housni Mubarak yang berusaha untuk tampil sebagai pemimpin dunia Arab.⁴⁶

Serangan Irak ke Kuwait merupakan bukti kekuatan dan keberanian Irak untuk menjadi negara super kuat di negara Arab. Karena setelah perang dengan Iran, Saddam ingin menjadikan Irak sebagai *super power* Arab dengan menjadikan negara-negara kecil di sekelilingnya menjadi wilayahnya. Kuwait yang merupakan negara kecil tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti, sehingga dengan mudah Saddam menguasai Kuwait.

2.2 Meletusnya Perang Teluk II

Setiap bangsa dan negara berhak untuk hidup dengan damai, aman, dan sejahtera, karenanya adalah sah bagi setiap bangsa dan negara untuk mempertahankan diri terhadap serangan dari pihak luar dan mengupayakan keamanan negeri dan rakyatnya. Tentunya tanpa membahayakan keamanan dan kesejahteraan bangsa lain, misalnya dengan menyusun kekuatan militer yang hebat guna menakut-nakuti bangsa lain, ataupun mengintervensi urusan dalam negeri bangsa lain.

Untuk itu, tanggal 2 Agustus 1990 merupakan suatu peristiwa yang sangat mengejutkan bagi dunia internasional umumnya dan rakyat Kuwait pada khususnya. Hari itu Irak menyerang Kuwait dengan kekuatan yang besar. Ketegangan antara Irak-Kuwait itu berawal dari pidato Presiden Saddam Husein tanggal 17 Juli 1990. Dalam pidatonya Saddam menuduh Kuwait dan Uni Emirat Arab curang dalam memproduksi minyak. Kedua negara ini memproduksi minyak

⁴⁶ Riza Sihbudi, 1991, *op. cit.*, hal. 153

melebihi quota yang ditetapkan OPEC. Akibatnya harga minyak anjlok dan Irak dirugikan 14 milyar dollar AS. Beberapa negara Arab berusaha ikut membantu ketegangan dua negara dan mempertemukan wakil dari Kuwait dan Irak dalam satu meja perundingan di Jeddah. Setelah perundingan antara Irak dan Kuwait di Jeddah mengalami jalan buntu, sekitar 100.000 tentara dan 400 tank Irak yang dilengkapi dengan artileri, helikopter, dan berbagai jenis mesin perang menyerbu dan menduduki Kuwait. Maka dalam jangka waktu hanya sekitar 9 jam, Kuwait yang luasnya hanya 17.819 km² sudah dikuasai Irak.⁴⁷

Kuwait city, ibu kota Kuwait memang hanya sekitar 100 km dari perbatasan Irak. Kuwait sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti terhadap Irak. Karena dalam segala hal kekuatan kedua negara jelas sangat tidak seimbang. Menurut data The International Institute for Strategies Studies,⁴⁸ jumlah personil militer Irak adalah 1 juta orang ditambah 850 ribu tentara cadangan, sementara Kuwait hanya memiliki 20.300 personil militer yang aktif. Belum lagi jika dilihat dari segi kemampuan dan pengalaman tempur mereka. Angkatan bersenjata Irak dilengkapi dengan sekitar 5.600 tank dan paling tidak sudah cukup teruji dalam perang melawan Iran. Sedangkan angkatan bersenjata Kuwait yang hanya dilengkapi 275 tank dapat dikatakan belum cukup berpengalaman. Karena itu Kuwait yang penduduknya hanya 2.039.000 yang merupakan sepersembilan dari penduduk Irak yang berjumlah 17.840.000 jelas bukan tandingan yang berarti bagi Irak.

Serangan Irak terhadap Kuwait mendapat reaksi keras dari berbagai negara, baik itu yang berada di Timur Tengah maupun yang ada di luar. Kecaman dari negara-negara Timur Tengah datang dari negara Arab yang tergabung dalam GCC (Gulf Corporation Council) atau Dewan Kerjasama Teluk Persia yang beranggotakan Bahrain, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab serta dari negara-negara yang tergabung dalam ACC (Arab Corporation Council) yang terdiri dari Mesir dan Yordania. Mereka menganggap serangan Irak terhadap Kuwait merupakan suatu pengkhianatan, karena Kuwait adalah sekutunya. Dan

⁴⁷ Riza Sihbudi, 1997, *op. cit.*, hal. 83

⁴⁸ Riza Sihbudi, 1991, *op. cit.*, hal. 148

juga Kuwait adalah salah satu negara Arab yang membantu Irak dalam menghadapi perang delapan tahun melawan Iran. Selama perang ini mereka berada di belakang Irak, sebab merupakan langkah-langkah untuk menghalangi pengaruh revolusi Iran (1978-1979) yang digerakkan kaum Mullah 'fundamentalis' dengan Imam Ayatullah Khomeini sebagai motornya. Di samping itu tindakan mereka pada hakikatnya didorong oleh semangat ideologi pan-Arabisme yang kuat, yaitu mewujudkan bangsa Arab yang satu.

Hampir semua negara di dunia mengecam invasi Irak ke Kuwait, reaksi yang sangat keras dari AS, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan lain-lain. AS yang kemudian membekukan aset Irak dan melarang perdagangan dengan Irak, demikian juga dengan Inggris dan Perancis. Uni Soviet menghentikan pengiriman senjata ke Irak. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi International melalui Dewan Keamanannya segera mengeluarkan resolusi no. 660 yang disahkan tanggal 2 Agustus 1990 yang isinya mengecam invasi Irak atas Kuwait, menuntut Irak menarik mundur pasukannya tanpa syarat ke posisi sebelum 1 Agustus 1990, meminta Irak dan Kuwait untuk segera berunding.

Di Kuwait, Irak sendiri telah membentuk pemerintahan boneka yang dipimpin oleh Kolonel Alaa Husein Ali yang merupakan menantu Saddam dengan merangkap empat jabatan sekaligus, yakni perdana menteri, panglima angkatan bersenjata, menteri pertahanan, dan menteri dalam negeri. Pemerintahan ini juga dilengkapi dengan sembilan anggota kabinet yang telah memiliki 80 ribu tentara rakyat.⁴⁹

Irak nampaknya tidak mengindahkan resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga memicu negara-negara lain untuk bertindak, terutama Saudi Arabia yang letaknya juga berbatasan dengan Irak. Demikian juga negara-negara besar dari Barat, terutama Amerika Serikat yang mempunyai hubungan dekat dengan Arab Saudi. Hubungan diplomatik kedua negara tersebut dimulai sejak 1939 dan sejak 1955 hubungan itu terus meningkat ke arah penjualan senjata dan berbagai perlengkapan militer serta pendidikan militer bagi perwira Arab Saudi di AS. Kerja sama bidang ekonomi juga telah terjalin dengan baik. Bukti statistik dari

⁴⁹ Riza Sihbudi, 1997, *op. cit.*, hal. 83

pemerintahan Arab Saudi menunjukkan bahwa pada 1988 pinaknya mengimpor senilai 3.8 milyar dollar AS dari AS dan mengekspor minyak senilai 5.6 milyar dollar AS.⁵⁰

Hubungan diplomatik AS dengan Timur Tengah bukan hanya terjalin dengan Arab Saudi saja, tetapi dengan banyak negara. Karena Timur Tengah merupakan sumber pemasok minyak dan wilayah untuk memasarkan hasil teknologinya termasuk kepada Irak. Kawasan teluk merupakan tempat di mana 60 % seluruh produksi minyak dunia dihasilkan. Sehingga kepentingan minyak AS di Timur Tengah menjadi terancam karena tindakan Irak menganeksasi Kuwait, demikian juga bagi negara-negara yang tergantung pada minyak. Karena apabila seorang pemimpin seperti Saddam Husein yang didukung oleh sejuta prajurit, ribuan tank, sejumlah rudal dan senjata pemusnah lainnya berhasil menguasai teluk, maka besar kemungkinan harga minyak dunia tidak lagi diatur oleh konsumen melainkan oleh seorang Saddam.

Amerika Serikat segera berupaya mencari dukungan dari seluruh dunia untuk menarik Irak dari Kuwait. Tetapi, Irak tetap pada pendiriannya untuk menguasai Kuwait. Bahkan Irak menjadikan Kuwait sebagai provinsi yang ke-19 pada 8 Agustus 1990. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari PBB yang kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 662 yang menganggap aneksasi Irak atas Kuwait tidak sah. Kekuatan militer dari pihak multinasional semakin meningkat, yang dipusatkan di Arab Saudi, sampai pada dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 678 yang disahkan pada 29 November 1990 yang berisi tentang pemberian legitimasi pada Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggunakan segala macam cara jika sampai 15 Januari 1991 Irak belum mundur dari Kuwait.

Tanggal 15 Januari 1991 merupakan batas akhir bagi Irak untuk meninggalkan Kuwait. Tetapi yang terjadi Irak tetap belum mundur dari Kuwait, sehingga pada 17 Januari 1990 pasukan multinasional melakukan serangan terhadap Irak. Serangan tersebut dikenal dengan "Operasi Badai Gurun". Serangan ini melibatkan perang darat, laut, dan udara. Sampai saat dimulainya

⁵⁰ Suara Pembaruan, 1991, *op. cit.*, hal. 166

perang darat, pihak multinasional mengaku telah menghancurkan semua fasilitas nuklir Irak, tiga fasilitas produksi dan sebelas fasilitas persenjataan kimia dan biologi, 60 % pusat komando militer utama Irak dan 70 % sarana komunikasi militernya, 75 % kemampuan tenaga generator listrik, 90 % jalur suplai logistik, 1.300 tank dan 800 kendaraan angkutan militer lainnya, serta 1.100 pucuk artileri Irak. Menurut deputi PM Irak Sadoun Hammadi, dalam 26 hari pertama perang saja, pemboman yang dilakukan sekutu telah menewaskan 20.000 warga Irak dan melukai 60.000 lainnya, serta menimbulkan kerugian pada infrastruktur Irak senilai 200 milyar dollar AS.

Sekalipun demikian, Irak tetap menolak untuk mundur dari Kuwait dan mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan PBB. Sesudah empat hari dilancarkan serangan darat yang dikombinasikan dengan serangan udara dan laut oleh pihak pasukan multinasional, Baghdad baru mau menerima syarat gencatan senjata. Tepatnya pada 28 Februari 1991, di mana radio Baghdad menyiarkan berita tentang instruksi Saddam kepada semua pasukan Irak untuk kembali pada posisi tanggal 1 Agustus 1990, yaitu posisi sebelum Irak memasuki Kuwait. Hal ini sekaligus mengakhiri 209 hari krisis dan perang Irak – pasukan multinasional.⁵¹

Dari total 109.876 misi serangan udara dan 88.500 ton bom yang dijatuhkan pihak multinasional selama 42 hari perang, termasuk empat hari perang darat, korban dipihak Irak menurut data intelijen AS diperkirakan mencapai 100.000 tentara tewas dan 20.000 ditawan. Sedangkan mesin perang Irak yang berhasil dilumpuhkan diantaranya meliputi 4.000 tank, 1.000 kendaraan lainnya, 3.000 artileri, 216 pesawat tempur, dan sejumlah kapal perang. Korban lain dipihak Irak adalah seperti yang diungkapkan oleh laporan tim medis AS, bahwa sekitar 170.000 balita Irak menderita kelaparan dan kurang gizi akibat blokade ekonomi.⁵²

⁵¹ Riza Sihbudi, 1997, *op. cit.*, hal. 100

⁵² *Tempo*, 27 Juli 1991

2.3 Implikasi Perang Teluk II Terhadap Negara-Negara Sekitar

Konflik Irak – Kuwait yang berkembang menjadi Perang Teluk II, perang antara Irak – pasukan multinasional ini menimbulkan kehancuran bukan hanya pada negara-negara yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini Irak dan Kuwait, tetapi juga pada negara-negara sekitarnya.

Kehancuran yang dirasakan disebabkan oleh besarnya serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ditambah dengan sanksi ekonomi yang diterapkan PBB terhadap Irak, sehingga negara-negara yang pada awalnya mempunyai hubungan kerja sama dengan Irak tidak dapat melanjutkan kerja samanya. Negara-negara itu antara lain Mesir, Yordania, Turki, dan Palestina.

Mesir

Akibat meletusnya perang Teluk II, Mesir kehilangan uang dari para pekerjanya di Kuwait dan Irak. Dari Kuwait saja setiap tahunnya mendapat kiriman uang sebesar 1 milyar dollar AS. Selain itu Mesir dihadapkan pada masalah sosial dengan meningkatnya jumlah pengangguran (yang sudah mencapai 7% dari 50 juta warga Mesir) akibat kembalinya 1.5 juta warga Mesir dari Irak dan puluhan ribu dari Kuwait. Akan tetapi Mesir lebih beruntung dibanding Yordania karena sebagai imbalan kesediaannya mengirimkan 20 ribu pasukannya ke Saudi, Mesir mendapat bantuan dana dari Jepang, penghapusan utang sebesar 7 milyar dollar AS pada AS, mendapat bantuan 800 juta dollar AS dari Saudi dan sebesar 500 juta dollar AS dari Al-Sabah.⁵³

Yordania

Perang teluk telah menyebabkan Yordanian kehilangan bantuan sebesar 50 juta dollar AS dari Irak dan 133 juta dollar AS dari Kuwait. Perdagangan dengan kedua Negara itu terhenti yang berarti terhentinya juga pemasukan sebesar 2 milyar dollar AS dari ekspor Yordania.

⁵³ *Tempo*, 22 September 1990

Akibat penerapan blockade ekonomi terhadap Irak, Turki salah satu pemasok bahan pangan terbesar ke Irak menderita kerugian sebesar 2 milyar dollar AS setahun. Dampak lain bagi Turki adalah berkurangnya arus wisatawan asing ke negeri itu.

Palestina

Dukungan Yasser Arafat kepada Irak menimbulkan kerugian bagi PLO sebab mempersempit ruang gerak diplomasi PLO, baik di tingkat regional maupun internasional. PLO juga kehilangan sokongan dana dari negara-negara Arab. Tetapi akibat konflik Teluk telah membuka kembali mata dunia tentang perlunya penyelesaian segera atas seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kemelut di Timur Tengah terutama tentang nasib Palestina.⁵⁴

⁵⁴ Riza Sihbudi, 1997, *op.cit.*, hal. 101

SANKSI PBB DAN IMPLIKASINYA BAGI IRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusionalnya melalui suatu instrumen pokok, berupa piagam yang ditandatangani di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945, dengan tekad semua anggotanya untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia. Di samping itu Piagam PBB juga telah meletakkan tujuan dan prinsip yang mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersahabat dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang, termasuk adanya kewajiban-kewajiban internasional semua negara untuk menghormati persamaan kedaulatan bagi semua bangsa, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, dan berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai.

Tujuan utama PBB pada hakekatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang. Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, karena pada waktu PBB didirikan masalah tersebut merupakan tugas dan tujuan pokok. Untuk itu PBB diharapkan dapat mengambil langkah-langkah kolektif secara efektif dalam usaha mencegah dan menghindari ancaman terhadap perdamaian, di samping untuk menekan tindak agresi atau pelanggaran lainnya terhadap perdamaian dan mengusahakannya dengan jalan damai, menyelesaikan perselisihan internasional atau situasi yang menjurus ke arah pelanggaran perdamaian.

Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dalam piagamnya, yakni:

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.
2. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan.
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman.
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan.
5. Prinsip umum mengenai kerja sama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁵⁵

Dalam menjalankan misinya, PBB mempunyai badan-badan pokok yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, tetapi masih berhubungan antara satu dengan yang lain. Badan-badan itu adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Masing-masing badan tersebut dibentuk guna mempermudah PBB dalam menangani suatu permasalahan yang disesuaikan dengan bidangnya.

Dari keenam badan pokok PBB yang disebutkan di atas, Dewan Keamananlah yang diberi tanggung jawab paling besar, yaitu tanggung jawab di dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tugas ini mempunyai resiko yang besar karena biasanya diwarnai oleh adanya konflik yang tidak hanya melibatkan dua negara, tetapi juga banyak negara yang berkepentingan dengan kedua negara yang sedang dalam konflik. Seperti yang terjadi antara Irak dan Kuwait yang kemudian melibatkan pasukan multinasional di pihak Kuwait.

Sifat keanggotaan Dewan Keamanan PBB yang ada dua, yakni anggota tetap dan anggota tidak tetap, sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Karena di dalam anggota tetap yang dipegang oleh AS, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan RRC terdapat hak istimewa atau *hak veto*. Hak ini dapat digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan untuk tidak setuju terhadap apa yang telah disepakati di dalam sidang Dewan Keamanan. Sehingga apabila ada salah satu atau ada negara anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak setuju

⁵⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1987, hal. 8 - 9

terhadap keputusan sidang, maka keputusan ini dianggap tidak sah. Sehingga tugas yang dihadapi Dewan Keamanan PBB akan semakin besar apabila di dalam permasalahan tersebut melibatkan kepentingan yang berbeda antara negara anggota tetap.

Dalam menangani suatu konflik bersenjata atau adanya suatu gerakan pasukan militer yang melintasi perbatasan dengan negara lain, langkah pertama yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB adalah dengan meminta pihak-pihak yang bersangkutan untuk menarik pasukan-pasukan mereka dan menghentikan pertikaian yang timbul. Kemudian Dewan Keamanan dapat membentuk suatu komisi penyelidik dengan kekuasaan sebagai perantara atau penawar jasa-jasa baik untuk datang ke tempat persengketaan dan memberi informasi yang berkenaan dengan kenyataan-kenyataan dari situasi tersebut kepada Dewan Keamanan dan berdasarkan tanggung jawab sendiri berusaha mengadakan diskusi dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam menghentikan konflik dan genjatan senjata.⁵⁶ Sehingga cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan bersifat tradisional, seperti negosiasi, penggunaan pihak ketiga (jasa-jasa baik), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian hukum.

Meskipun demikian PBB tetap melakukan penyempurnaan pada cara-cara tradisional tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti dalam Piagam PBB yang secara khusus memperbolehkan penggunaan kekerasan seperti kekuatan militer dalam rangka melaksanakan hak bela diri, baik secara sendirian maupun secara bersama-sama, apabila terjadi serangan terhadap salah satu anggota PBB.⁵⁷

Hal ini seperti yang diterapkan oleh PBB dalam menyelesaikan konflik Irak - Kuwait, di mana PBB memberikan hak kepada pasukan multinasional untuk menggunakan segala macam cara dalam mengusir Irak dari Kuwait, yang kemudian menimbulkan Perang Teluk II yakni perang antara Irak - pasukan multinasional.

⁵⁶ James Barros. *PBB Dulu, Kini dan Esok*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1990, hal. 51

⁵⁷ Sumaryo Suryokusumo, 1987, *op. cit.*, hal. 15

Keputusan-keputusan PBB untuk menangani konflik Irak – Kuwait sampai menjadi Perang Teluk II dicantumkan melalui resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang semuanya mencapai 12 buah. Beberapa dari resolusi dari Dewan Keamanan ini merupakan sanksi PBB yang ditujukan kepada Irak sebagai reaksi dari invasinya terhadap Kuwait.

3.1 Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB

Salah satu syarat untuk menjadi anggota PBB adalah negara yang merdeka. Irak tercatat menjadi anggota PBB pada 21 Desember 1945. Irak merupakan salah satu negara anggota utama dari PBB, yaitu negara yang ikut di dalam penandatanganan Konferensi San Francisco tanggal 24 Oktober 1945. Jumlah dari negara anggota utama PBB itu sendiri adalah 51 negara. Sedangkan Kuwait tanggal 14 Mei 1963 baru tercatat sebagai anggota PBB.

PBB sebagai organisasi internasional yang tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, mempunyai tugas di dalam menyelesaikan konflik Irak – Kuwait, terlebih lagi kedua negara tersebut merupakan anggotanya. Langkah yang diambil PBB di dalam menyelesaikan konflik kedua negara tersebut tercantum dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan.

Resolusi Dewan Keamanan yang dikeluarkan pertama kali dalam menanggapi konflik Irak – Kuwait adalah Resolusi No. 660 yang disahkan tanggal 2 Agustus 1990. Inti dari resolusi ini adalah mengutuk Irak, mendesak diberlakukannya gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait. Perbandingan suara yang diperoleh dalam Dewan Keamanan PBB mengenai Resolusi No. 660 adalah 14:0, yakni 14 negara setuju sedangkan Yaman tidak berpartisipasi.

Sifat keanggotaan Dewan Keamanan terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap meliputi lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan RRC. Sedangkan anggota tidak tetap yang terdiri dari sepuluh negara diadakan pemilihan setiap satu tahun sekali, dengan penyebarannya sebagai berikut: lima wakil dari negara-negara Asia Afrika, dua

wakil dari Amerika Latin, satu wakil dari Eropa Timur, dan dua wakil dari Eropa Barat.⁵⁸

Resolusi Dewan Keamanan No. 660 merupakan reaksi atas tindakan Irak menyerang Kuwait dan menguasainya. Tindakan Irak ini telah melanggar pasal 2 ayat 4 dari Piagam PBB, yaitu suatu tindakan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, karena Kuwait merupakan negara yang berdaulat.

Irak nampaknya tidak menghiraukan resolusi Dewan Keamanan tersebut, Saddam Hussein tetap bersikeras untuk menduduki Kuwait. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai negara. Pada 3 Agustus 1990 Liga Arab yang mengadakan pertemuan darurat di Kairo sangat mengutuk intervensi Irak ke Kuwait dan menuntut penarikan segera pasukan Irak dari wilayah yang didudukinya serta tidak akan mengakui sesuatu pun sebagai hasil serbuan itu. Sebanyak 14 dari 21 anggota Liga Arab mendukung kutukan itu, sedang 6 lainnya abstain. Keenam negara itu adalah Sudan, Palestina, Yordania, Mauritania, Irak, dan Yaman. Sedangkan Libya tidak memberikan suara. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan pernyataan sebagai berikut: Irak harus menarik mundur tentaranya dari wilayah Kuwait; Irak harus menghentikan usahanya untuk mengganti pemerintahan di Kuwait secara paksa dan membiarkan masalah intern itu diputuskan sendiri oleh rakyat Kuwait secara bebas; dan kedua negara harus sepakat untuk menciptakan suatu prosedur guna mengatasi kericuhan mereka lewat perundingan.⁵⁹

Besarnya reaksi yang ditimbulkan dari berbagai negara, baik yang bersifat individu maupun kelompok kepentingan, mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang kedua. Dewan Keamanan menerbitkan Resolusi No. 661 yang disahkan tanggal 6 Agustus 1990. Perimbangan suara yang diperoleh di dalam menerbitkan resolusi ini adalah 13:0, karena Yaman dan Kuba abstain. Resolusi No. 661 menyerukan diberlakukannya sanksi dan embargo terhadap Irak dan Kuwait yang telah didudukinya. Dengan diterbitkannya Resolusi No. 661, masyarakat Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap

⁵⁸ Soepardi Sarihartono, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hal. 201 - 202

⁵⁹ Suara Pembaruan, 1991. *op.cit.*, hal. 230-231

Irak, mereka sepakat untuk menghentikan impor minyak dari Irak dan melarang pengiriman senjata ke negara tersebut. Hal ini akan sangat merugikan Irak, karena Irak mengekspor lebih dari 30 juta ton minyak mentah ke pasaran Masyarakat Ekonomi Eropa. Hal serupa juga dilakukan oleh Kanada dan Jepang yang menerapkan embargo terhadap minyak Kuwait dan Irak. Swiss yang dikenal sebagai negara netral, untuk pertama kalinya dalam sejarah mulai berpihak, Swiss ikut melaksanakan embargo terhadap Irak. Sedangkan Turki menutup aliran minyak Irak ke Mediteranian. Sekitar 50 kapal perang AS, Inggris dan Perancis berpatroli di Teluk untuk memblokir setiap ekspor minyak Irak yang melewati laut.

Dengan diberlakukannya embargo terhadap Irak, Irak menjadi negara yang terkucil dari kehidupan internasional. Ditambah dengan AS dan sekutunya yang menggalang kekuatan militer di Arab Saudi dengan berbagai peralatan yang canggih semakin menjadikan Irak sebagai musuh dari semua negara di dunia. Tetapi pemerintahan Saddam nampaknya tidak gentar dengan berbagai sanksi yang diterapkan di negerinya, ia bahkan mengumumkan Kuwait menjadi bagian dari wilayahnya, yaitu sebagai propinsi ke-19 Irak pada 8 Agustus 1990.

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 9 Agustus 1990 menerbitkan Resolusi No. 662 yang disetujui oleh semua anggotanya sebagai reaksi atas tindakan Irak yang menganeksasi Kuwait. Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa aneksasi yang dilakukan Irak sama sekali tidak berdasar hukum dan meminta Baghdad menyerahkan negara kecil itu kepada pemerintah yang lama. Yaman yang merupakan sekutu Irak dan satu-satunya negara Arab di Dewan Keamanan menyuarakan pendapatnya dan meminta Irak membatalkan aneksasinya atas Kuwait. Resolusi ini tidak segera mendapatkan reaksi dari presiden Irak yang telah mengumumkan bahwa penggabungan itu bersifat kekal dan tak terpisahkan. Irak bahkan menutup semua pintu perbatasan dan melarang orang-orang asing meninggalkan negara itu. Hanya diplomat yang diperbolehkan meninggalkan Irak dan Kuwait. Irak meminta semua kedubes asing di Kuwait untuk memindahkan operasi mereka ke Baghdad dalam waktu dua minggu. Ratusan warga Barat di Kuwait ditangkapi dan dibawa ke Baghdad untuk

dijadikan sandera, terutama para warga asing yang negaranya berada di pihak pasukan multinasional.⁶⁰

Pada 18 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB meloloskan Resolusi No. 664 yang menuntut Irak agar membebaskan semua warga asing yang terdapat di Irak dan Kuwait. Keesokan harinya, tanggal 19 Agustus 1990, Saddam Hussein menyatakan bersedia membebaskan semua sandera, asal Presiden Bush membuat pernyataan tertulis akan menarik semua pasukan AS dari Arab Saudi, tidak menyerang Irak dan menghentikan embargo terhadap Irak. Tetapi AS menolak tawaran Saddam Hussein. Bahkan juru bicara Gedung Putih menjelaskan bahwa proposal Irak sama sekali tidak menyinggung seruan PBB dan Liga Arab agar Irak menarik diri dari Kuwait. Pada hari ini juga Irak berjanji akan membebaskan warga negara yang negaranya mengambil sikap netral dalam krisis teluk dan memperingatkan akan menghukum negara-negara yang agresif dengan menggunakan warga mereka sebagai tameng hidup terhadap serangan. Sekitar 21.000 orang barat terperangkap pada saat Irak menyerbu Kuwait tanggal 2 Agustus 1990, termasuk di dalamnya 3.000 warga AS dan 4.000 warga Inggris. Pada tanggal 21 Agustus 1990, Saddam memberi tahu para duta besar negara-negara barat bahwa warga negara dari tujuh negara anggota Masyarakat Eropa yang berada di Kuwait diijinkan untuk pergi, yaitu warga negara Italia, Belgia, Spanyol, Denmark, Belanda, Irlandia, dan Yunani. Mereka diijinkan meninggalkan Kuwait lewat Yordania dan Turki.

Kedua semakin genting ketika kedua belah pihak, antara Irak dan AS sebagai pemimpin pasukan multinasional, tetap pada pendiriannya. Irak tetap mempertahankan Kuwait sebagai wilayahnya dan AS terus meningkatkan kekuatan militernya. Diperkirakan lebih dari 100.000 tentara AS sudah berada di Arab Saudi ditambah dengan tentara dari negara-negara sekutunya yang dilengkapi dengan peralatan militer yang besar dan canggih.

Tanggal 25 Agustus 1990 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang kelima dalam menanggapi konflik teluk. Resolusi No. 665 ini memberikan wewenang kepada pasukan multinasional untuk menginspeksi kapal-kapal Irak

⁶⁰ *Tempo*, 2 Februari 1991

guna menegakkan pelaksanaan sanksi ekonomi. Perimbangan suara yang diperoleh adalah 13:0, karena Yaman dan Kuba abstain. Adanya resolusi ini mengakibatkan Irak tidak dapat berhubungan dengan negara lain, karena semua perbatasan telah diblokade oleh kapal-kapal perang AS dan sekutunya. Meskipun demikian upaya untuk mencegah terjadinya perang terus diupayakan. Sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar mengadakan pertemuan dengan Menlu Irak, Tariq Aziz di Amman Yordania untuk mencari jalan keluar. Namun Irak tetap pada pendiriannya, kecuali kesediaannya untuk melepaskan sebagian dari para sandera yang ditahannya. Sehingga pada 30 Agustus 1990 Irak mulai memindahkan sebanyak 237 sandera wanita dan anak-anak dari berbagai instalasi yang mungkin menjadi sasaran perang di Baghdad. Sementara itu pasukan multi nasional terus menambah kekuatan militernya, baik itu pada jumlah personel militer maupun perlengkapannya dan juga semakin bertambah pula jumlah negara yang berpihak kepada sekutu. Bahkan tanggal 10 September 1990 presiden Bush dan M. Gorbachev mengingatkan Irak bahwa kedua negara adikuasa itu akan bertindak lebih keras jika pasukan Irak tidak ditarik dari Kuwait.

* Akibat dari diberlakukannya embargo ekonomi, rakyat Irak kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Bahkan karena terlalu ketatnya blokade yang ditujukan pada Irak, pengiriman bahan makanan dan obat-obatan ke Irak dan Kuwait harus melalui PBB. Hal ini dicantumkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 666 yang disahkan tanggal 13 September 1990 dengan perimbangan suara 13:0, sebab Yaman dan Kuba menentang.

Selanjutnya pada 16 September 1990, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi yang ketujuh di dalam menanggapi krisis teluk. Resolusi No. 667 ini disetujui oleh semua anggota, yang isinya menghimbau Irak untuk mentaati hukum internasional. Resolusi ini diterbitkan mengingat situasi di Timur Tengah yang semakin memanas, dimana kedua belah pihak saling menambah kekuatan militer. Di pihak pasukan multinasional, Inggris menambah personel militernya sebanyak 9.000 pasukan, Perancis 4.000, Mesir 15.000, Pakistan 3.000 dan Uni Emirat Arab 15.000 pasukan. Di lain pihak, Irak memobilisasi 250.000 pasukannya, 100.000 diantaranya segera dikirimkan ke Kuwait. Semakin

memanasnya suhu politik dan keamanan di Timur Tengah mengakibatkan harga minyak dunia mencapai titik tertinggi dalam sembilan tahun terakhir, yaitu 35 dollar AS per barel.⁶¹ Dalam resolusi ini diharapkan Irak akan segera menarik pasukannya dari Kuwait. Mengingat dengan diberlakukannya embargo ekonomi di Irak, kondisi Irak semakin melemah. Tetapi pada 23 September 1990, Saddam justru mengancam akan menyerang ladang minyak Arab Saudi, jika Irak mengalami kesulitan ekonomi akibat embargo tersebut.

Meskipun pemimpin negaranya terus bersikeras untuk mempertahankan Kuwait dengan menambah kekuatan militernya, rakyat Irak sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain. Akibat embargo yang sangat ketat, segala macam kebutuhan harus dipenuhi sendiri, sehingga harga segala macam kebutuhan melambung tinggi. Untuk itu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 669 yang disahkan tanggal 24 September 1990 dan disetujui semua anggotanya. Resolusi ini memberi tugas kepada komite dalam hal-hal yang menyangkut permintaan bantuan. Mereka dibentuk untuk melancarkan proses pendistribusian bantuan kemanusiaan yang ditujukan kepada rakyat Irak dan Kuwait yang menjalani sanksi ekonomi. Komite ini bertugas dibawah perintah Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan PBB semakin memperketat sanksinya terhadap Irak. Hal ini dinyatakan dalam Resolusi No. 670 yang disahkan pada 25 September 1990 yang isinya melarang penerbangan ke Irak dan Kuwait kecuali yang menyangkut bantuan kemanusiaan. Perimbangan suara dalam menetapkan resolusi ini adalah 14:0, sebab Kuba menentang. Dengan dikeluarkannya Resolusi No. 670, jalan darat, laut, dan udara yang menuju ke Irak dan Kuwait berhenti total. Irak harus memenuhi segala kebutuhannya sendiri dan juga tidak dapat mengekspor minyak sebagai komoditas utamanya. Hal ini mengakibatkan kehidupan ekonomi Irak yang baru diperbaiki mengalami kehancuran lagi.

Besarnya tekanan yang ditujukan kepada Irak dari berbagai negara, membuat Saddam melepaskan sandernya secara berangsur-angsur. Tanggal 23 Oktober 1990 di Baghdad sekitar 400 sandera warga Perancis dan 33 warga

⁶¹ *Tempo*, 22 September 1990

Inggris dilepaskan. Disusul dengan dibebaskannya 74 sandera warga Jepang pada 7 Nopember 1990 dan 120 sandera lagi yang sebagian besar warga Jerman pada 20 Nopember 1990.

Kuwait sebagai negara yang dianeksasi, roda pemerintahannya tidak dapat berjalan, akibatnya semua bidang kehidupan di Kuwait tidak bisa berjalan seperti biasanya. Kerugian material sangat besar jumlahnya dan sebagai negara yang terjajah, rakyatnya harus tunduk pada negara yang menjajah. Untuk mencegah dan menghindari kerugian yang lebih besar di pihak Kuwait, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 674 dengan perimbangan suara 13:0, karena Yaman dan Kuba abstein. Resolusi ini disahkan tanggal 29 Oktober 1990 yang berisi tentang dilaksanakannya pendokumentasian kerugian material dan pelanggaran hak asasi manusia di Kuwait sejak diduduki Irak. Sebulan berikutnya diterbitkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 677 tentang pendataan jumlah penduduk Kuwait yang disetujui oleh semua anggota, tepatnya disahkan tanggal 28 Nopember 1990. Resolusi ini dikeluarkan sebagai tanggapan besarnya pengungsi yang berasal dari Kuwait dan Irak yang terdiri dari berbagai warga negara. Mereka mengungsi ke negara-negara di sekitarnya, seperti Yordania, Arab Saudi, dan Iran. Karena terlalu ketatnya penjagaan lalu lintas melalui darat, laut, dan udara yang melintasi teluk Persia, pada 27 Nopember 1990, tercatat 4.162 pencegatan lalu lintas yang dilakukan oleh pasukan multinasional. Jumlah ini hanya lalu lintas yang melewati laut Teluk Persia saja.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 678 yang disahkan tanggal 29 Nopember 1990 berisi tentang perintah agar Irak menarik mundur pasukannya dari Kuwait serta mematuhi segenap ketentuan yang ditetapkan PBB selambatnya 15 Januari 1991. Perimbangan suara di dalam menetapkan resolusi ini adalah 12:0 di mana Yaman dan Yordania menentang. Sedangkan RRC abstein. Resolusi ini diterbitkan karena melihat kekuatan kedua belah pihak yang semakin bertambah dan pendirian Saddam yang tetap mempertahankan Kuwait. Resolusi ini oleh pihak AS dan sekutunya diterjemahkan sebagai ijin penggunaan kekuatan militer jika Irak tidak mau mematuhi ketentuan PBB sampai 15 Januari 1991. Resolusi no. 678 merupakan resolusi yang ke-12 dan terakhir sampai pada batas waktu

yang diberikan pada Irak selama konflik. Sampai tiba batas waktu yang diberikan, Irak tetap berada di Kuwait, maka dua hari sesudahnya pecahlah Perang Teluk II antara Irak-pasukan multinasional dengan AS sebagai pemimpinnya. Meskipun segala upaya untuk menghindari perang telah dilakukan sebelum pada batas akhir resolusi, namun segala jalan yang ditempuh selalu menemui jalan buntu.

3.2 Implikasi Sanksi PBB bagi Irak

Sikap PBB yang tidak bersifat netral dan non-diskriminatif terhadap kasus Irak ini dapat dilihat dari dikeluarkannya resolusi-resolusi PBB yang berjumlah 12 dan salah satu di antaranya adalah berisi embargo ekonomi terhadap Irak. Tanggal 6 Agustus 1990 merupakan hari dimulainya embargo ekonomi PBB terhadap Irak. Isi penerapan embargo ekonomi terhadap Irak antara lain, meliputi: embargo ekspor-impor dari dan ke Irak, embargo suplai makanan, embargo militer, serta pembekuan aset ekonomi Irak di luar negeri, yang menurut MEES (Middle East Economy Survey) berjumlah 5 milyar dollar AS yang berada lebih di 30 negara,⁶² dialihkan untuk membayar suplai dan kemanusiaan ke Irak, menghapuskan semua senjata pemusnah massalnya dan mengkompensasi semua kerugian Kuwait serta korban perang lainnya. Sebagai konsekuensinya, salah satu asset Irak di luar negeri yang antara lain berada di Saudi Arabia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang berjumlah total 700 juta dollar AS beserta bunganya yang bernilai 185 juta dollar AS tidak bisa dicairkan.

Implikasi embargo ekonomi oleh PBB terhadap Irak tersebut mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi kehidupan rakyat Irak, baik di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun politik pemerintahan Irak.

Realitas ini bertolak dari tersingkirnya Irak dalam pergaulan internasional baik secara politis maupun ekonomi. Padahal sebelumnya hampir semua aspek kehidupan dalam negeri Irak bergantung dunia internasional dengan ladang minyaknya yang menghasilkan 20 milyar dollar AS, dari ekspor minyak ke luar negeri yang berjumlah 3 juta barel per hari sebelum Perang Teluk II.⁶³ Kondisi ini

⁶² *Kompas*, 10 Maret 1991

⁶³ *Kompas*, 28 September 1995

bertolak belakang dengan ekspor minyak pasca Perang Teluk II, dengan halnya diijinkannya Irak mengekspor minyak ke Yordania sebanyak 75.000 barel per hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya, pemerintahan Saddam membuat kebijaksanaan dengan mengekspor minyaknya secara ilegal kepada Turki sebanyak 150.000 barel per hari, dengan cara demikian pemerintah Irak dapat menyuntikkan dana 2 juta dollar AS per hari dalam kas negara.⁶⁴

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penderitaan yang terjadi di Irak pasca pemberlakuan sanksi ekonomi PBB maka akan diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Krisis Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Kemerosotan Bidang Sosial Masyarakat Dalam Negeri Irak

Sejak diterapkannya sanksi ekonomi pada tanggal 6 Agustus 1990 perekonomian Irak mengalami kemunduran. Daya beli masyarakat menurun drastis akibat turunnya nilai mata uang Dinar secara tajam, keadaan tersebut juga terkondisikan dengan adanya kenyataan membungahnya harga kebutuhan pokok di pasaran.

Berdasarkan data yang ada, bahwa sejak 1991 nilai Dinar terus melemah hingga 50 % di bandingkan dengan sebelum embargo. Perbandingan antara nilai Dinar Irak dan Yordania yang dulu berbanding 1 : 2 kini menjadi 1 : 100.⁶⁵ Sementara itu kurs Dinar Irak terhadap dollar AS, yang sebelum invasi ke Kuwait bernilai 3 Dinar, merosot menjadi 1200 Dinar per dollarnya, pada bulan September 1995 merosot tajam menjadi 2000 Dinar, dan 2400 Dinar pada bulan Oktober 1995.⁶⁶

Seiring dengan merosotnya nilai mata uang Dinar, kualitas hidup kaum menengah merosot ke kelas marginal. Selama 1992, pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) hanya bergerak 2,8 % sehingga pendapatan per kapita Irak, yang pada tahun 1990 telah mencapai 2.400 dollar AS, menjadi 64 dollar AS pada tahun 1992.⁶⁷

⁶⁴ *Kompas*, 12 Agustus 1996

⁶⁵ *Merdeka*, 6 September 1995

⁶⁶ *Gatra*, 21 Oktober 1995

⁶⁷ *Ibid.*, 28 oktober 1995

Berdasarkan angka-angka nominal di atas tentunya berakkses luas bagi kemampuan masyarakat Irak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segala kebutuhan primer yang sebelumnya disediakan secara cuma-cuma oleh pemerintah, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bahan pangan pada akhirnya harus mereka penuhi sendiri. Hal ini diakibatkan melambungnya harga bahan makanan pokok (beras, tepung, terigu, teh, dan minyak goreng) tidak terkendali. Sebagai contoh harga beras naik menjadi 1200 dinar per kilogram pasca embargo. Di lain pihak, gaji pegawai negeri Irak hanya 3000 dinar per bulan, dengan gaji resminya 1000 dinar dan sisanya merupakan tunjangan dari pemerintah Irak.⁶⁸

Kemerosotan bidang ekonomi selanjutnya berdampak luas bagi kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya. Langkanya obat-obatan yang tersedia di rumah-rumah sakit Irak, menyebabkan angka kematian balita mengalami kenaikan tajam sampai 700 % di banding tahun 1987 dengan kenaikan rata-rata mencapai 30 % per tahun.⁶⁹ Dari data-data yang diperoleh dari rumah sakit Irak tercatat jumlah balita meninggal mencapai 85.942 pada tahun 1991, 123.463 anak pada 1992, meningkat lagi pada tahun 1993 dan 1994 menjadi 128.023 dan 133.593, yang pada paruh 1995 mencapai 81.593 balita. Secara total bisa dijumlahkan balita yang meninggal sejak 1991 - 1995 mencapai 625.500 jiwa. Sampai pada tahun 1999 jumlah seluruh rakyat Irak yang meninggal akibat sanksi PBB mencapai satu juta orang, di mana dua per tiga dari jumlah tersebut merupakan anak-anak.⁷⁰

Secara general sebab-sebab kematian tersebut diindikasikan sebagai akibat serangan berbagai penyakit seperti kolera, leukimia, malaria, penyakit panas serta penyakit lainnya, yang merebak sejak berakhirnya Perang Teluk II. Selain itu berbagai jenis penyakit yang melanda Irak sedikit banyak juga ditimbulkan oleh kondisi sanitasi yang buruk, banyaknya debu dan air yang tercemar. Berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan Irak, jumlah air yang layak minum hanya

⁶⁸ *Kompas*, 26 Oktober 1995

⁶⁹ *Merdeka*, 6 September 1995

⁷⁰ (http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/030317/khususirak_33.shtml)

tinggal 2 %, sementara sisanya telah tercemar oleh zat radioaktif dan terkontaminasi karbon monoksida yang membahayakan.⁷¹

Berdasarkan laporan badan hak asasi manusia PBB dikemukakan bahwa situasi kemanusiaan di Irak sudah sangat memprihatinkan dan berada pada ambang batas yang membahayakan. Diperkirakan dari 4 juta penduduk Irak, di antaranya 2,4 juta balita menderita kekurangan gizi (mal nutrisi) yang parah.

Sementara itu di sektor pendidikan kondisinya tidak lebih baik. Seperti diungkapkan oleh Menteri pendidikan Irak, DR Abdul Jabbar Tawfeeq pada akhir tahun 1995, bahwa selama 1990 – 1996 tercatat 3.973 proyek pembangunan sekolah terbengkalai. Sehingga gedung sekolah yang layak dipakai jumlahnya sangat terbatas. Ruang kelas yang semestinya hanya menampung 30 siswa ketika sebelum perang, kini terpaksa menampung sampai 70 siswa. Pada tahun ajaran 1995 – 1996 yang lalu sebanyak 151.366 siswa terpaksa putus sekolah, terdiri dari 86.413 siswa lulusan SD, 58.069 lulusan SMP, 4.276 lulusan SMA, 2.437 lulusan kejuruan, dan 191 siswa lulusan sekolah pendidikan guru dan seni.⁷²

Sejalan dengan kondisi di atas, kemerosotan bidang sosial terlihat juga dari sistem keamanan, etika, serta hubungan antar manusia. Tindakan kriminalitas pada pra-embargo intensitasnya kecil, semakin hari semakin meningkat dari kekerasan fisik sampai tindakan kekerasan bersenjata yang tidak jarang berakhir dengan pembunuhan.

Pencurian dan perampokan merupakan tindakan yang biasa dilakukan secara terang-terangan. Pungutan liar dan suap menyuap dikalangan pemerintah dan dunia pendidikan juga sudah merupakan hal yang biasa. Harga diri dan kehormatan sudah bukan lagi merupakan atribut yang harus diperhitungkan bagi penentu suatu sikap dan perbuatan.

Fenomena baru yang terjadi di tengah-tengah penderitaan rakyat Irak akibat embargo ekonomi di atas, tidak lain disebabkan karena pada masa sebelumnya rakyat Irak selalu mengandalkan tenaga-tenaga asing dalam menjalankan roda ekonomi mereka. Sementara bagi para profesional Irak lainnya

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Harun Yahya. *Di Balik Perang Irak*, (online), (<http://harunyahya.com/indo/artikel/028.html>)

banyak yang memilih keluar negeri Irak dengan tujuan ke negara-negara Arab lainnya yang lebih menjanjikan hidupnya.⁷³

Dengan demikian yang menjadi persoalan menonjol dalam masalah sosial ekonomi dan bahkan budaya Irak saat masa embargo ekonomi adalah perjuangan mereka mengatasi berbagai kesulitan hidup dan terjadinya kemerosotan moral masyarakat secara umum.

3.2.2 Krisis Kehidupan Politik Pemerintahan Irak

Penerapan embargo ekonomi di Irak mengakibatkan situasi perekonomian dalam negeri Irak merosot drastis yang akhirnya mempengaruhi suhu kehidupan politik pemerintahan. Pemerintahan Saddam yang menyandarkan basis kekuasaannya pada Partai Baath, militer, dan aliansi keluarga mulai mendapatkan ancaman. Ancaman yang datang dari bentuk pembelotan elit-elit politik sampai dengan rencana penggulingan kekuasaan Saddam. Ironisnya sebagian besar ancaman berasal dari keluarga terdekat Saddam dan menduduki posisi penting dalam sistem pemerintahan Irak. Selain itu juga terdapat ancaman dari kelompok oposisi yang bermarkas di luar negeri dan pemberontak dari suku Kurdi di Irak utara serta kelompok Syi'ah di Irak selatan yang sejak pecah Perang Teluk I sudah berpihak pada Teheran.

Adapun ancaman itu antara lain pada Agustus 1993 Duta Besar Irak untuk Kanada dan Tunisia, yaitu Hisyam Al – Shawi dan Hamed Al – Jubouri yang bekerja sama dengan kelompok oposisi Saddam di pengasingan yang melarikan diri ke Inggris yang diketuai oleh Ahmad Al – Chalabi. Selanjutnya kelompok oposisi yang menamakan kelompoknya Kongres Nasional Irak ini dalam kegiatannya mendapat bantuan dari Inggris dan Amerika Serikat.⁷⁴ Pada Juni 1995 Jendral Turki Ismail Al – Dulaimi melakukan aksi bersenjata di sebelah barat Baghdad, tepatnya di dekat penjara Abu Gharib yang didukung oleh beberapa anggota Garda Republik. Aksi bersenjata ini dilakukan setelah anggota

⁷³ *Gatra*, 28 oktober 1995

⁷⁴ *Gatra*, 10 Februari 1996

keluarganya, Jendral angkatan udara Muhammad Mazlum Al - Dulaimi di bunuh secara keji pada bulan Mei 1995.⁷⁵

Pada Agustus 1995 dua orang menantu Saddam Hussein, Letjend Hussein Kamel Hassan dan Letkol Saddam Kamel Hassan , yang menjabat sebagai menteri industri dan mineral dan kepala pasukan elit kepresidenan melakukan pembelotan dan meminta bantuan ke Yordania. Pembelotan ini disusul dengan pembelotan yang dilakukan oleh Barzan Al - Takriti, duta besar Irak untuk PBB di Jenewa, Swiss yang merupakan saudara tiri Saddam. Selain itu penasehat presiden untuk organisasi kemasyarakatan Irak, dan pernah menjabat sebagai Gubernur Propinsi Hilla dimasa kependudukan Kuwait yaitu Hussein Al - Majid menghilang dari Baghdad setelah pemecatan yang dilakukan Saddam terhadap kakaknya, Ali Hasan Al - Majid sebagai menteri pertahanan Irak pada Mei 1995.

Dengan adanya usaha-usaha penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer dan sebagian elit pemerintahan Irak tersebut dalam kenyataannya telah menunjukkan pada dunia internasional mengenai adanya dua indikasi penting yang berkaitan dengan kepemimpinan Saddam di Irak. Dua indikasi yang dimaksud adalah pertama, menyangkut kredibilitas Saddam Hussein dalam kerjasamanya selama ini dengan PBB menyangkut data-data mengenai kekuatan militernya pasca Perang Teluk II, di mana dengan membelotnya Hussein Kamel Hassan yang menjabat sebagai kepala program industri Irak sehingga dialah orang yang tahu mengenai program persenjataan rahasia Irak, maka rahasia kekuatan militernya akan terbongkar. Kedua, mengenai tanda-tanda akan rapuhnya basis kekuasaan Saddam Hussein, mengingat selama ini Saddam Hussein sangat mengandalkan aliansi keluarga, patai Baath dan militer sebagai basis kekuasaannya. Meskipun terdapat banyak pembelotan dalam kehidupan politik pemerintahan Saddam, namun hal ini belum mampu menggeser kekuasaannya. Terbukti sampai sekarang Saddam masih memegang kekuasaan di Irak. Dan mampu membawa rakyat Irak untuk tetap bertahan dalam menghadapi sanksi PBB.

⁷⁵ *Republika*, 30 Agustus 1995

KESIMPULAN

Pada bulan Juli 1990 Irak menuduh Kuwait mencuri minyak di daerah Rumaila, wilayah yang sedang dipertikaikan antara kedua negara. Selanjutnya Irak menyerang Kuwait pada 2 Agustus 1990. Invasi Irak ini mengundang berbagai reaksi dari banyak negara. PBB kemudian memberikan sanksi kepada Irak dengan menerapkan embargo ekonomi.

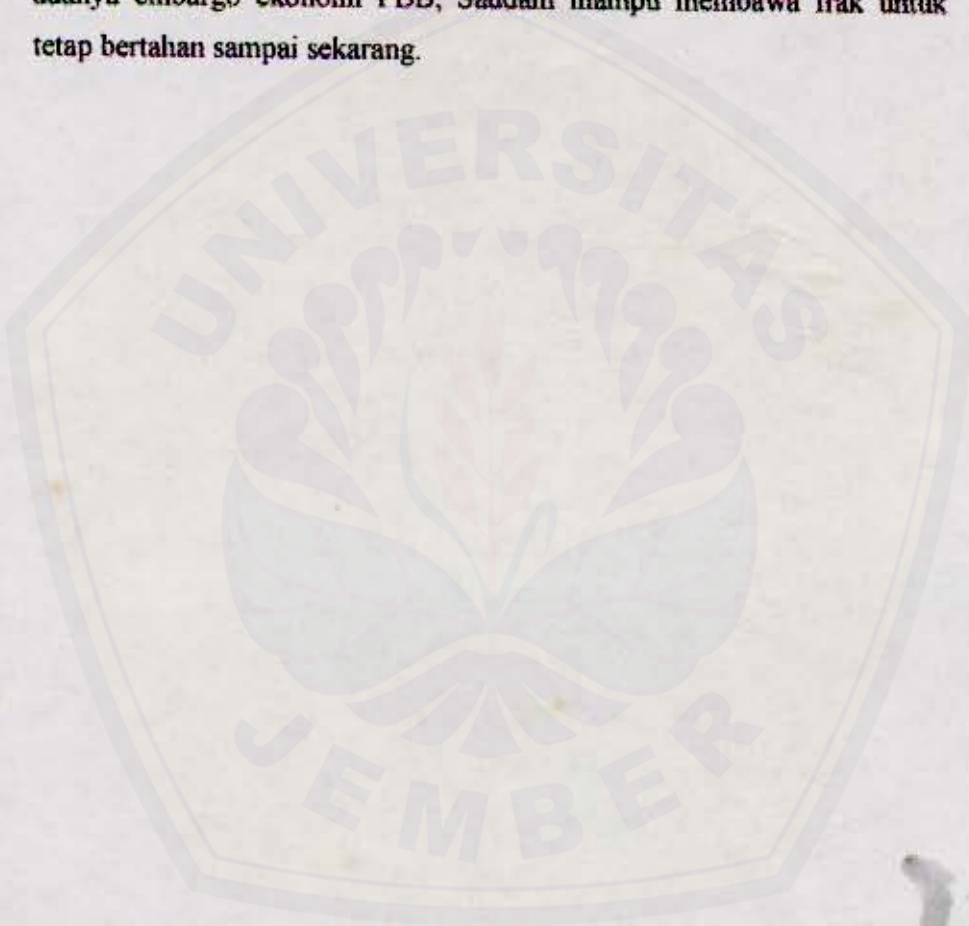
Sanksi PBB yang menerapkan embargo ekonomi di Irak membawa Irak pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Segala aspek kehidupan mengalami kehancuran, terutama bidang ekonomi, bidang sosial budaya, politik pemerintahan yang pada akhirnya mempengaruhi kadar legitimasinya dalam memimpin Irak.

Upaya yang dilakukan Saddam Hussein sebagai pemegang pucuk pimpinan di Irak untuk menghadapi sanksi PBB yang mengakibatkan berbagai krisis segala bidang kehidupan, yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan di bidang ekonomi dengan mengekspor minyaknya secara gelap (illegal) ke negara-negara tetangganya dan negara-negara lain yang mau menerimanya, serta menggalakkan bidang pertanian dan industri yang mendukung pertanian. Kebijakan ini diterapkan agar Irak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, karena adanya embargo ekonomi nyaris semua perdagangan dengan pihak luar terputus.
- 2) Kebijakan di bidang sosial budaya dengan menerapkan berbagai aturan yang keras dan pemeliharaan serta rekonstruksi bangunan-bangunan peninggalan peradaban yang pernah ada di Irak. Kebijakan ini diharapkan akan mampu mengubah kondisi kehidupan sosial di Irak yang sangat rendah dengan banyaknya kerusakan-kerusakan sebagai akibat krisis ekonomi, serta menumbuhkan sikap bangga pada rakyat Irak akan kebesaran yang pernah diraih oleh peradaban-peradaban yang pernah ada di Irak.



- 3) Kebijakan di bidang politik pemerintahan, yaitu dengan mengadakan referendum, reformasi kabinet serta pembersihan dalam tubuh militer. Kebijakan ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat pada pemerintahan Saddam Hussein yang mulai banyak mendapat perlawanan dari dalam negeri Irak. Dan juga membuktikan pada dunia luar bahwa kekuasaan Saddam masih mendapatkan legitimasi penuh dari rakyatnya yang terlihat dari hasil referendum. Meskipun banyak sekali usaha untuk menggulingkan kekuasaannya, baik dari dalam maupun luar negeri seperti adanya embargo ekonomi PBB, Saddam mampu membawa Irak untuk tetap bertahan sampai sekarang.



- Anonim. 1991. *Perang Teluk Malapetaka Dunia*. Jakarta: PT Media Interaksi Utama dan PT Pustaka Sinar Harapan.
- Asgar Bixby. 1993. *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Bandoro, Bantrato. 1991. *Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*. Jakarta: CSIS.
- Barros, James. 1990. *PBB Dulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Dahl, Robert. 1994. *Analisa Politik Modern*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research Field Study Thesis and Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Imawan, Riswandha. 1998. *Membedah Politik Ode Baru: Catatan dari Kaki Merapi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jatmika, Sidik. 2000. *Membongkar Politik Standart Ganda Amerika Serikat*. Yogyakarta : Bigraf.
- Mas'ood, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Plano, C. Jack, Robert E. Riggs, dan Helena S. Robin.1982. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Rais, Amien.1990. *Timur Tengah dan Krisis Teluk Sebuah Analisa Kritis*. Surabaya: CV. Amar Press.
- Sariohartono, Soepardi. 1993.*Organisasi dan Administrasi Internasional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sihbudi, Riza. 1991. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- 1995. *Profil Negara Timur Tengah*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- 1997. *Indonesia Timur Tengah Masalah dan Prospek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Surachmad, Winarno. 1975. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press.

The Liang Gie. 1974. *Ilmu Politik*. Yogyakarta: FISIP UGM.

Yin, K Robert. 1998. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ensiklopedia

"Iraq," Microsoft ® Encarta ® 96 Encyclopedia © 1993 – 1995 Microsoft Corporation

"Hussein, Saddam" Microsoft ® Encarta ® 96 Encyclopedia © 1993 – 1995 Microsoft Corporation

Situs Internet

<http://www.pakta.org/news/viewArsip.asp?cat=Militer&ArsipID=1458.html>

http://www.rnw.nl/ranesi/html/toh_perang.html

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0304/02/kha1.htm>

<http://www.pakta.org/news/viewarsip.asp?cat=Militer&ArsipID=1458>

<http://www.members.tripod.com/skypin/pendik/pendidik45.html>

<http://www.Indonesia.cri.com.cn/Indonesian/2003/Mar/121152.htm>

<http://harunyahya.com/indo/artikel/028.html>

<http://www.mainsaham.com/art15/artele.jsp?artid=3899>

<http://www.cyberita.asia1.com.sg/komentar/story/0,3617,16899,00.htm>

<http://www.detik.com/peristiwa/2003/04/03/2003/0404-064609.3html>

<http://www.hidayatullah.com/2000/02/perjalan.htm>

http://www.asiamaya.com/panduasia/iraq/e-01land/ei-land13_m

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/030317_khususirak33.shtml

<http://www.straitstimes.asia1.com.sg/iraqwar/story/0,4395,180465,00.html>

<http://www.tempo.co.id/news/2003/4116/1,1,3.id.html>

<http://www.msnbc.com/news/822481.asp?cp1=1#BODY>

<http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bush/oilprice.htm>

Jurnal dan Majalah

Global Jurnal Politik Internasional No. 2 Tahun 1991.

Jurnal Ilmu Politik No. 9 Tahun 1991.

Jurnal Ilmu Politik No. 12 Tahun 1993.

Jurnal Ilmu Politik No. 14 Tahun 1993.

Gatra, 21 Oktober 1995

-----, 28 Oktober 1995

-----, 10 Februari 1996

-----, 28 Oktober 1996

Tempo, 22 September 1990

-----, 22 September 1990

-----, 2 Februari 1991

-----, 22 Juni 1991

-----, 27 Juli 1991

-----, 15 Juni 1996

Time, 6 Agustus 1990

Ummat, 8 Juni 1998,

Harian Umum

Jawa Pos, 4 Agustus 1990

-----, 27 Januari 1996

-----, 28 Februari 1996

Kompas, 10 Maret 1991

-----, 12 Agustus 1995

-----, 24 Agustus 1995

-----, 28 September 1995

-----, 20 Oktober 1995

-----, 26 Oktober 1995

-----, 12 Agustus 1996

Merdeka, 6 September 1995

Pikiran Rakyat, 14 September 1995

Republika, 30 Agustus 1995

-----, 2 Oktober 1995

Suara Merdeka, 10 April 2002

Suara Pembaruan, 20 Januari 1995



PETA IRAK



Sumber: ©1988 – 1998 Microsoft and/or its suppliers. All right reserved

PERBANDINGAN KEKUATAN IRAK VS MULTINASIONAL

Perang Teluk Untuk Membebaskan Kuwait Antara Pasukan Multinasional Pimpinan AS Lawan Pasukan Irak Telah Berakhir Dengan Dibebaskannya Kuwait. Di Bawah Ini Adalah Daftar Negara Peserta Pasukan Dan Perlengkapan Perangnya Yang Ambil Bagian Maupun Terlibat Dalam Perang Teluk.

Irak : 545.000 Tentara, 5.500 Tank Tempur, 3.500 Senjata Berat/Artileri, 700 Pesawat Tempur A.I. MIG-29 Buatan Uni Soviet, Mirage Buatan Perancis Dan 17 Kapal Perang.

Pihak Multinasional

1. AS : 527.000 Tentara, Lebih 100 Kapal Perang A.I. Kapal Induk, 1.800 Pesawat tempur dan pesawat pembom, 1.700 Helikopter dan 1.200 Tank.
2. Inggris : 43.000 Tentara, 170 Tank, 16 Kapal perang, 72 Pesawat tempur.
3. Perancis : 16.000 Tentara, 80 Pesawat tempur, 120 Helikopter anti-tank, 40 Tank.
4. Turki : 135.000 Tentara & para militer, 50 tank, 50 Pesawat tempur F-16, 3 Kapal perusak, 2 Kapal selam, 1 Kapal penyapu ranjau dan 2 Kapal fregat, disiagakan di perbatasan Irak untuk jika perlu diterjunkan ke Perang teluk.
5. Belgia : 2 Kapal penyapu ranjau dan sebuah kapal pemasok.
6. Kanada : 1.700 Tentara, 3 Kapal perang, Skuadron pesawat tempur.
7. Denmark : Satu Korvet.
8. Yunani : 1 Fregat Dengan 200 Tentara.
9. Italia : 3 Fregat, 1 Kapal Amfibi Dan 8 Pesawat Tempur.
10. Belanda : 2 Fregat, Sebuah Kapal Pemasok Dengan Awak 600 Orang.
11. Norwegia : 1 Fregat Penjaga Pantai.
12. Spanyol : 1 Fregat Dan 2 Korvet.
13. Arab Saudi : 118.000 Tentara, 550 Tank, 180 Pesawat Tempur, 8 Fregat.
14. Kuwait : 20.300 Tentara, 275 Tank, 90 Artileri, 20 Pesawat Tempur Mirage, 18 Helikopter.
15. Mesir : 40.000 Tentara.
16. Emirat Arab : 40.000 Tentara, 200 Tank, 80 Pesawat Tempur, 1.500 Angkatan Udara, 15 Kapal, 1.500 Angkatan Laut.
17. Oman : 25.500 Tentara, 63 Pesawat Tempur, 4 Kapal Perang.
18. Siria : 15.000 Tentara, 300 Tank.
19. Maroko : 1.300 Tentara.
20. Bahrain : 2.300 Tentara Darat, 450 Tentara Udara, 600 Tentara Laut.
21. Argentina : 1 Fregat Dan 1 Korvet.
22. Australia : 600 Tentara, 1 Kapal Perusak, 1 Fregat, 1 Kapal Pemasok.
23. Bangladesh : 2.000 Tentara.
24. Bulgaria : 276 Tentara.
25. Cekoslowakia : 2.000 Tentara & Unit Anti Senjata Kimia.
26. Selandia Baru : 2 Pesawat angkut Hercules.
27. Nigeria : 500 Tentara.
28. Pakistan : 11.000 Tentara.
29. Polandia : 2 Kapal penolong.
30. Senegal : 500 Tentara.
31. Uni Soviet : 2 Kapal perang.
32. Rumania : Tim medis 360 orang, 180 penasehat militer anti senjata kimia.
33. Korea selatan : 5 Pesawat angkut militer C-130 dan 150 Pilot.
34. Singapura : 30 Pesawat.

Sumber: Suara Pembaruan, PT Media Interaksi Utama dan PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Resolusi-resolusi DK - PBB Tentang Konflik Teluk

Nomor	Tgl. Disahkan	Isi dan perimbangan Suara di DK-PBB
660	2-8-1990	Menuntut penarikan mundur Irak (14 setuju: Yaman tidak berpartisipasi).
661	6-8-1990	Embargo terhadap Irak (13 setuju: Yaman dan Kuba abstain).
662	9-8-1990	Menolak aneksasi Irak atas Kuwait (Semua setuju).
664	18-8-1990	Irak agar membebaskan semua warga asing (semua setuju)
665	25-8-1990	Memberikan wewenang pada pasukan multinasional untuk menginspeksi kapal-kapal Irak (13 setuju: Yaman dan Kuba abstain).
666	13-9-1990	Pengiriman bahan makanan dan obat-obatan ke Irak dan Kuwait harus melalui PBB (13 setuju: Yaman dan Kuba menentang).
667	16-9-1990	Mengimbau Irak untuk mentaati hukuman internasional (semua setuju).
669	24-9-1990	Penugasan komite dalam hal-hal yang menyangkut permintaan bantuan (semua setuju).
670	25-9-1990	Melarang penerbangan ke Irak dan Kuwait kecuali yang menyangkut bantuan kemanusiaan (14 setuju: Kuba menentang).
674	29-10-1990	Pendokumentasian kerugian material dan pelanggaran hak asasi manusia di Kuwait sejak di duduki Irak (13 setuju: Yaman dan Kuba abstain).
677	28-11-1990	Pendapatan jumlah penduduk Kuwait (semua setuju)
673	29-11-1990	Pemberian legitimasi pada AS dan sekutunya untuk menggunakan segala macam cara jika sampai 15-01-1990 Irak tidak mundur dari Kuwait (12 setuju: yaman dan Kuba menentang, RRC abstain).

Sumber: Global Jurnal Politik Internasional 2, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991